

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SABANG MENURUT PENGELOUARAN

2013-2017



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SABANG

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SABANG MENURUT PENGELOUARAN

2013-2017



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SABANG

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SABANG MENURUT PENGELOUARAN 2013-2017

***Gross Regional Domestic Product of Sabang
Municipality By Expenditure 2013-2017***

Nomor Katalog BPS/BPS Catalog Number :

Ukuran Buku/Book Size : 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman/Total Page :

Naskah/Manuscript :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Section of Regional Account and Statistical Analysis

Gambar Kulit/Cover Picture :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Section of Regional Account and Statistical Analysis

Diterbit Oleh/Published by :

Badan Pusat Statistik Kota Sabang

BPS-Statistics Indonesia of Sabang City

**Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya
*May be cited with reference to the source***

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA SABANG MENURUT PENGELOUARAN 2013-2017

***Gross Regional Domestic Product of Sabang
Municipality By Expenditure 2013-2017***

Tim Penyusun/*Drafting Team*

Pengarah/*Director* : Drs. T. Djohansjah

Editor/*Editor* : Edi Kurniawan, SST

Penulis/*Writer* : Uun Malihanhawa, SST

Pengolah data/*Data Processor* : Uun Malihanhawa, SST

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sabang menurut Pengeluaran tahun 2013-2017 ini merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Sabang. Sebagai kelanjutan dari publikasi sebelumnya, publikasi ini menyajikan tinjauan tentang perkembangan ekonomi makro Kota Sabang dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2017). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh PBB.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dan penghargaan disampaikan kepada tim yang telah berhasil menyusun publikasi ini dengan tepat waktu. Selanjutnya saran dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini pada periode mendatang.

Sabang, September 2018
Kepala BPS Kota Sabang,

Drs. T. Djohansjah

PREFACE

Gross Regional Domestic Product (GRDP) is one of the economic data tools that can be used to evaluate the economic development performance of a region (province or district/city). This data tool can also be used for other purposes and purposes, such as the basis for developing economic models in order to formulate policy formulations, the level of velocity of money, financial deepening, taxation, export studies and import and so on.

The publication of Gross Regional Domestic Product (GRDP) of Sabang City by Expenditure 2013-2017 is an annual publication issued by the Statistics of Sabang City. As a continuation of the previous publication, this publication presents an overview of the macroeconomic development of Sabang City in the last five years (2013-2017). GRDP data in this publication and subsequent publications use the 2010 base year, and have adopted the 2008 System of National Accounts concept as recommended by the United Nations.

Hopefully this publication will be useful for data users and the award will be delivered to the team who have successfully compiled this publication on time. Furthermore, suggestions from various parties are expected to improve this publication in the coming period.

*Sabang, September 2018
Chief BPS-Statistics of Sabang City,*

Drs. T. Djohansjah

DAFTAR ISI

CONTENTS

KATA PENGANTAR	iv
PREFACE	v
DAFTAR ISI	vi
CONTENTS	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2 Pengertian PDRB, Agregat PDRB dan Tahun Dasar	4
1.3 Manfaat dan Implikasi Perubahan Tahun Dasar 2010.....	6
1.4 Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010 ...	8
1.5 Kegunaan	9
II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	17
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	20
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	23
2.5 Perubahan Inventori	28
2.6 Ekspor Impor	32
III. TINJAUAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELOUARAN	37
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran	37
3.1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010.....	37
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	38
3.1.3 Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran.....	40
3.1.4 Indeks Harga Implisit dan Laju Indeks Harga Implisit	41
3.2 Konsumsi Rumah Tangga	43
3.2.1 Distribusi Persentase ADHB.....	43
3.2.2 Laju Pertumbuhan	44
3.2.3 Laju Indeks Implisit	46
3.2.4 Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	47
3.3 Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)	49
3.4 Konsumsi Pemerintah.....	50
3.5. Pembentukan Modal Tetap Bruto	52
3.6 Perubahan Inventori	54

3.7 Ekspor dan Impor Antar Daerah (Net Ekspor)	55
IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGGUNAAN	59
4.1 PDRB Perkapita.....	59
4.2 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Ekspor	60
4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB	61
4.4 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	62
4.5 Perbandingan Ekspor Terhadap PMTB	63
4.6 Perbandingan PDRB Terhadap Impor	63
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	64
V. PENUTUP	69
LAMPIRAN	73
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2013-2017	37
Gambar 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2013-2017	38
Gambar 3. 3 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (Persen), 2013-2016	39
Gambar 3. 4 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen), 2012 dan 2016	41
Gambar 3. 5 Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, 2013-2017....	42
Gambar 3. 6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (Persen),2013-2017	42
Gambar 3. 7 Distribusi Persentase Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB	43
Gambar 3. 8 Distribusi Persentase Subkomponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Persen), 2012 dan 2016	44
Gambar 3. 9 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHK 2010 (persen), 2013-2017	46
Gambar 3. 10 Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (Juta Rupiah), 2013-2017	47
Gambar 3. 11 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (Persen), 2013-2017	48
Gambar 3. 12 Distribusi Persentase Komponen Konsumsi LNPRT ADHB	49
Gambar 3. 13 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi LNPRT ADHK 2010 (Persen), 2013-2017	50
Gambar 3. 14 Distribusi Persentase Komponen Konsumsi Pemerintah ADHB (Persen), 2013-2017	51
Gambar 3. 15 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Pemerintah ADHK 2010 (Persen), 2013-2017	51
Gambar 3. 16 Distribusi Persentase Komponen PMTB ADHB (Persen), 2013-2017	52
Gambar 3. 17 Laju Pertumbuhan Komponen PMTB ADHK 2010 (Persen), 2013-2016	53

Gambar 3. 18 Nilai Perubahan Inventori ADHB (Juta Rupiah), 2013-2017	54
Gambar 3. 19 Distribusi Persentase Perubahan Inventori ADHB (Persen), 2013-2017	55
Gambar 4. 1 Nilai PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah), 2013-2017	59
Gambar 4. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHB (Persen), 2013-2017 ...	59
Gambar 4. 3 Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor ADHB (Triliun Rp), 2013-2017	60
Gambar 4. 4 Rasio Komponen Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Ekspor, 2013-2017	60
Gambar 4. 5 Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB ADHB (Triliun Rp), 2013-2017	61
Gambar 4. 6 Rasio Komponen Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB, 2013-2017	61
Gambar 4. 7 Nilai Komponen Konsumsi Akhir (Triliun Rp), 2013-2017	62
Gambar 4. 8 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB (Persen), 2013-2017	62
Gambar 4. 9 Nilai Komponen Ekspor dan PMTB (Triliun Rp), 2013-2017	63
Gambar 4. 10 Rasio Komponen Ekspor Terhadap PMTB, 2013-2017	63
Gambar 4. 11 Nilai Komponen Impor dan PMTB (Triliun Rp), 2013-2017.....	64
Gambar 4. 12 Rasio Komponen Impor Terhadap PMTB, 2013-2017	64
Gambar 4. 13 Proporsi PDRB dan Komponen Impor Terhadap Total Permintaan Akhir (Persen), 2013-2017.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha . 8	
Tabel 1. 2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	9
Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHK 201045	
Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Komponen Konsumsi Rumah Tangga (Persen), 2013-2017	47
Tabel 3. 3 Nilai ADHB (Miliar Rupiah) dan Kontribusi Net Ekspor (Persen), 2013-2017	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2013-2017	73
Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2013-2017	74
Lampiran 3 Distribusi Persentase Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2013-2017	75
Lampiran 4 Distribusi Persentase Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen), 2013-2017.....	76
Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017	77
Lampiran 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017 ...	78
Lampiran 7 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (2010 = 100), 2013-2017	79
Lampiran 8 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (2010 = 100), 2013-2017	80
Lampiran 9 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (2010 = 100), 2013-2017.....	81
Lampiran 10 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017.....	82

<https://sabangkota.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijaksanaan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
- b. Perluasan kesempatan kerja.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat.
- d. Peningkatan hubungan ekonomi regional.
- e. Pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata.

Kemudian untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi. Angka Pendapatan Regional atau PDRB merupakan suatu indikator berupa data agregat yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

I. INTRODUCTION

1.1. Background

Information on economic development is needed to plan and conduct government performance evaluations. One of the statistical data needed for macroeconomic planning and evaluation activities is Gross Regional Domestic Product (GRDP). With the availability of GRDP data, the economic development strategies and policies that the government has taken can be evaluated, and improved or continued in the future.

The essence of economic development is a series of business activities and policies that aim to:

- a. Improving the standard of living of the community.
- b. Expansion of employment opportunities.
- c. Equitable distribution of community income.
- d. Increasing regional economic relations.
- e. Economic shift from the primary sector to the secondary and tertiary sectors.

In other words, the direction of economic development is to strive to increase people's income with an even distribution.

Then to find out the level of income growth of a region's people need to be presented periodically regional income that can be used as regional/regional development planning material, especially in the economic field. Regional Income Figures or GRDP is an indicator in the form of aggregate data that can be used to measure the level of economic growth of a region.

Sementara itu dalam beberapa buku referensi ditegaskan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan daripada penyediaan. Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan produksinya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dibutuhkan dibutuhkan parameter untuk memantau perkembangan permintaan atau konsumsi masyarakat luas.

1.2 Pengertian PDRB, Agregat PDRB dan Tahun Dasar

PDRB merupakan neraca makro ekonomi yang dihitung secara konsisten dan terintegrasi berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi dan cara penghitungan yang telah disepakati secara Internasional. Tujuan menghitung PDRB adalah untuk mengetahui total produksi barang dan jasa pada suatu wilayah selama kurun waktu tertentu.

Nilai PDRB adalah nilai tambah dari total produksi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan produksi adalah aktifitas ekonomi yang menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Perubahan nilai PDRB dari waktu ke waktu terjadi karena dua hal, yaitu terjadinya perubahan harga barang dan jasa atau karena terjadinya perubahan volume. Karenanya ada dua jenis nilai PDRB disajikan yakni berdasarkan harga konstan dan berdasarkan harga berlaku.

Meanwhile in some reference books it is emphasized that development and economic growth are more determined by factors of demand than supply. The development that occurs as a result of changes in lifestyle and consumption behavior of some modern societies has encouraged producers to increase their production both in quantity and quality, which in turn encourages development and economic growth. Thus, a parameter is needed to monitor the development of demand or consumption of the wider community.

1.2 Definition of GRDP, GRDP Aggregate and Base Year

GRDP is a macroeconomic balance that is calculated consistently and integrated based on the internationally agreed concept, definition, classification and calculation method. The purpose of calculating GRDP is to find out the total production of goods and services in an area for a certain period of time.

GRDP value is the added value of the total production. Whereas what is meant by production is economic activity that uses available resources to produce goods and services.

Changes in GRDP value from time to time occur because of two things, namely the change in the price of goods and services or due to changes in volume. Therefore there are two types of GRDP values presented based on constant prices and based on current prices.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan pergeseran tahun dasar Produk Domestik Bruto (PDB) yang dilakukan dalam lingkup nasional, BPS Provinsi Aceh juga melakukan pergeseran tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke tahun 2010. Keseragaman tahun dasar PDRB dan PDB memungkinkan pengguna data dapat melakukan perbandingan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, demikian juga perbandingan antar daerah.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara Tiongkok-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Gross Regional Domestic Product (GRDP) based on current prices or known as nominal GRDP is compiled based on the prices prevailing in the accounting period, and aims to see the structure of the economy. Whereas GRDP on the basis of constant prices is arranged based on prices in the base year and aims to measure economic growth.

In line with the shift in the base year of the Gross Domestic Product (GDP) carried out in the national scope, the BPS of the Province of Aceh also made a shift in the GRDP base year from 2000 to 2010. The uniformity of the basic year of GRDP and GDP allows data users to compare national and regional economic growth, as well as regional comparisons.

Over the past ten years, many changes have taken place in the global and local order which have a profound effect on the national economy. The global financial crisis that occurred in 2008, the implementation of free trade between China-ASEAN (CAFTA), changes in the international trade recording system and the expansion of capital market services are examples of changes that need to be adapted in the national statistical recording mechanism.

One form of adaptation to national statistical records is to change the year of Indonesia's GDP base from 2000 to 2010. Changes in the base year of GDP are carried out in line with adopting the United Nations (UN) recommendations contained in the 2008 System of National Accounts (SNA2008) through the preparation of a Supply framework and Use Tables (SUT).

Changes to the base year of GDP are carried out simultaneously with the calculation of the Province's Gross Regional Domestic Product (GRDP) to maintain consistency in the results of calculations.

SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

1.3 Manfaat dan Implikasi Perubahan Tahun Dasar 2010

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;

The 2008 SNA is a standard international recommendation on how to measure economic activity in accordance with conventional calculations based on economic principles. The recommendations referred to are expressed in a set of concepts, definitions, classifications, and balance sheet rules that are agreed internationally in measuring certain items such as GRDP.

SNA is designed to provide information about the activities of economic actors in terms of production, consumption and accumulation of assets and can be used for the benefit of analysis, decision making, and policy making. By using the SNA Framework, economic phenomena can be better explained and understood.

1.3 Changes in Benefits and Implications of the 2010 Basic Year

The benefits of changes in GRDP base year include:

- *Inform the latest regional economies such as shifting structures and economic growth;*
- *Improve the quality of GRDP data;*
- *Making GRDP data comparable internationally.*

Shifting the price of the base year will have several impacts, including:

- *Increase nominal GRDP, which in turn will have an impact on shifting income groups in an area from low income, to medium, or high and a shift in the structure of the economy;*
- *Will change the magnitude of macro indicators such as tax ratios, debt ratios, investment and saving ratios, current account values, structure and economic growth;*

- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga Produsen (*Producers Price Index/PPI*);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Will cause changes in data input for modeling and forecasting.

The Central Statistics Agency (BPS) has periodically changed the base year 5 (five) times, namely in 1960, 1973, 1983, 1993 and 2000. The year 2010 was chosen as the new base year replacing the 2000 base year for the following reasons:

- *Indonesia's economy in 2010 was relatively stable;*
- *There has been a change in the economic structure over the last 10 (ten) years, especially in the field of information and technology and transportation which has an influence on distribution patterns and the emergence of new products;*
- *UN recommendations regarding the replacement of the base year every 5 (five) or 10 (ten) years;*
- *There is a renewal of the concept, definition, classification, scope, data source and methodology according to the recommendations in SNA2008;*
- *Availability of new data sources for improvement of GRDP such as 2010 Population Census data (SP 2010) and Producers Price Index (PPI);*
- *Availability of an SUT framework that describes the balance of production and consumption flows (goods and services) and the creation of income from these production activities.*

1.4 Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

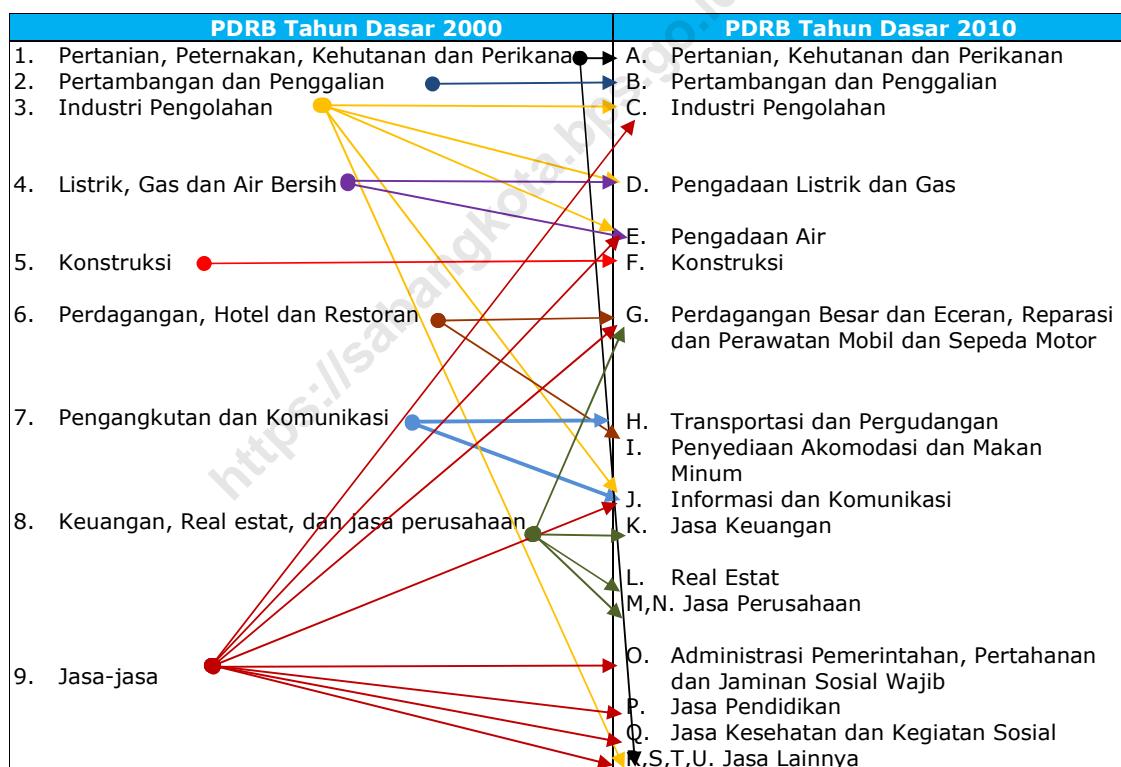
Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 ($2000=100$) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 ($2010=100$) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut:

1.4 Changes in Classification from GRDP in the 2000 Basic Year to GRDP in the 2010 Basic Year

The GRDP classification according to the 2000 base year business field ($2000=100$) uses the Indonesian Business Field Classification 1990 (KLUI 1990) while in the 2010 base year GRDP ($2010=100$) uses KBLI 2009. The comparison of the two at the most aggregate level can be seen in the following table:

Tabel 1. 1 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010

Table 1. 1 Comparison of Changes in GRDP Classification by Business Field 2000 and 2010 Base Year



Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut:

While the classification of GRDP according to expenditure in the 2010 base year in general does not experience much change like the following table:

Tabel 1. 2 Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran

Tahun Dasar 2000 dan 2010

Table 1. 2 Comparison of Changes in GRDP Classification by Expenditure in 2000 and 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 4. Perubahan Inventori 5. Ekspor 6. Impor	 1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 5. Perubahan Inventori 6. Ekspor 7. Impor

1.5 Kegunaan

Kegunaan dari penyusunan publikasi PDRB Provinsi Aceh 2013-2017 menurut pengeluaran adalah:

1. Untuk menyatakan komposisi penggunaan barang dan jasa baik yang dihasilkan dalam daerah maupun yang berasal dari daerah lain termasuk impor dari luar negeri, untuk memenuhi permintaan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
 - b. Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba
 - c. Pengeluaran konsumsi pemerintah
 - d. Pembentukan modal tetap bruto
 - e. Perubahan inventori
 - f. Ekspor neto, yaitu ekspor dikurang impor.
2. Mengetahui dan mempelajari fenomena, tatanan maupun perilaku ekonomi makro berbagai pelaku ekonomi seperti perilaku konsumsi masyarakat, pemerintah dan investasi (fisik).
3. Mengetahui informasi tentang surplus atau defisitnya neraca perdagangan barang dan jasa dengan daerah lain.
4. Penyajian angka pendapatan regional atas dasar harga konstan akan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, baik secara menyeluruh maupun sektoral.

1.5 Purpose

The usefulness of the preparation of the 2013-2017 Provincial Province PDRB publication according to expenditure is:

1. To declare the composition of the use of goods and services produced both within the region and those from other regions, including imports from abroad, to fulfill the following requests:
 - a. Household consumption expenditure
 - b. Consumption of private non-profit institutions
 - c. Government consumption expenditure
 - d. Gross fixed capital formation
 - e. Inventory changes
 - f. Net exports, namely exports reduced by imports.
2. Knowing and studying the phenomenon, order and macroeconomic behavior of various economic actors such as the consumption behavior of society, government and investment (physical).
3. Knowing information about the surplus or deficit in the trade balance of goods and services with other regions.
4. Presentation of regional income figures on the basis of constant prices will show the economic growth rate of a region, both thoroughly and sectorally.

5. Nilai pendapatan atau PDRB per kapita secara makro dapat digunakan dalam melakukan analisis perbandingan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lain, serta peningkatannya setiap tahun.
 6. Penyajian pendapatan regional atas dasar harga berlaku bersama-sama dengan harga konstan dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat inflasi/deflasi setiap tahunnya.
 7. Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan di bidang perekonomian daerah.
- 5. Value of income or GRDP per capita on a macro basis can be used in comparing analysis of the level of prosperity of an area with other regions, as well as increasing each year.*
- 6. Presentation of regional income at current prices together with constant prices can be used as an indicator to see the rate of inflation / deflation every year.*
- 7. As input for policy makers in the regional economy.*

BAB II

MODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi

II. ESTIMATION AND SOURCES OF DATA METHODS

2.1 Household Final Consumption Expenditures

The household sector has a significant role in the economy. This is reflected in the large contribution of household consumption in the formation of expenditure GRDP. Besides acting as the final consumer of goods and services, households also act as producers and providers of production factors for production activities carried out by other institutional sectors.

Household final consumption expenditure (PKRT) is expenditure on goods and services by households for consumption purposes. Households are defined as individuals or groups of individuals who live together in a residential building. They collect income, can have assets and obligations, and consume goods and services together, especially food and housing groups.

*Household final consumption expenditure covers all expenditures on goods and services by residents of a region, whether done inside or outside the domestic territory of a region. The types of goods and services consumed are classified according to the COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) as recommended by the United Nations (UN), as follows:*

1. Non-alcoholic food and beverages
2. Alcoholic, tobacco and narcotics drinks
3. Clothing and foot equipment
4. Housing, water, electricity, gas and other fuels
5. Furniture, household supplies and routine maintenance
6. Health
7. Transport
8. Communication

9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
 10. Pendidikan
 11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
 12. Barang dan jasa lainnya
- Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:
1. Makanan, Minuman, dan Rokok
 2. Pakaian dan Alas Kaki
 3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
 4. Kesehatan dan Pendidikan
 5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
 6. Hotel dan Restoran
 7. Lainnya
- Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:
- a. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
 - b. Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
 - c. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri.
 - d. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain.
 - e. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

9. Recreation / entertainment and culture
 10. Education
 11. Provision of food and drinks / lodging
 12. Other goods and services
- However, due to limited data, the 12 COICOPs were regrouped to become only 7 COICOPs, namely:
1. Food, Drinks and Cigarettes
 2. Clothing and Footwear
 3. Housing, Tools, Equipment and Household Operations
 4. Health and Education
 5. Transportation, Communication, Recreation and Culture
 6. Hotels and Restaurants
 7. Others

Household consumption includes the following:

- a. *Imputation of owner occupied dwellings services;*
- b. *Estimated value of self-owned house rental must be taken into account because the owner's household is considered to produce a house rental service for himself. Imputation of house rent is estimated based on market prices, even though the status of the house is self-owned. If the household actually rents, then what is calculated is the rental fee paid, either full or not paid because it gets a fee (subsidy or transfer).*
- c. *Goods produced and used alone.*
- d. *Giving / gifts in the form of items received from other parties.*
- e. *Goods and services purchased directly (direct purchase) by residents outside the region or abroad (treated as imports).*

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- a. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut).
- b. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- c. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- d. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- b. Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- c. Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- d. Indeks Harga Konsumen (IHK).

There are several notes that need to be known regarding this household final consumption expenditure, namely:

- a. Direct purchase by non-residents is treated as an export from the region).*
- b. Purchases of goods that are not reproduced (duplicated), such as antiques, paintings, and other works of art are treated as investments in valuables, not household consumption.*
- c. Household expenditures for intermediate costs and capital formation in household business activities are not included in household consumption expenditure. For example, the purchase of goods and services for business purposes, large repairs of houses, and home purchases.*
- d. Expenditures for the purpose of transfer in the form of money or goods are not included as household consumption expenditure.*

The data sources used to estimate household final consumption expenditure are:

- a. The BPS National Socio-Economic Survey (Susenas), in the form of per-capita consumption expenditure a week for food, and per-capita expenditure a month for non-food groups,*
- b. Mid-year population,*
- c. Secondary data (from BPS or from outside BPS), in the form of data or indicators of commodity supply and certain types of expenditure,*
- d. Consumer Price Index (CPI).*

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*).

Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *supply* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin ke 3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;

Household final consumption expenditure calculations are based on Susenas results. However, because the estimation of household expenditure data from Susenas tends to be underestimate (especially for non-food groups and processed food groups), adjustment is necessary.

In making adjustments, secondary data is used in the form of data or supply indicators from various data sources outside Susenas. After the adjustment results are obtained, what is done is to replace the Susenas results with the results of calculations based on secondary data. Replacement is done at the level of commodities, commodity groups, or certain types of expenditure. This is done because the results of calculations from secondary data are considered to reflect the actual household final consumption expenditure more.

The calculation step above produces the amount of household final consumption expenditure based on the current price. Household final consumption expenditure on the basis of constant prices 2010, was obtained by deflating household final consumption expenditure at current prices with the 2010 base year CPI.

For more details, steps for calculating household final consumption expenditure can be summarized as follows:

1. *Household final consumption expenditure estimation of Susenas results:*
 - a. *Food = consumption expenditure per capita a week $\times (30/7) \times 12 \times$ total population mid-year*
 - b. *Non-food = consumption per month per capita $\times 12 \times$ mid-year population*
2. *The 1st point data is grouped into 7 COICOP groups, with several commodities that may be controlled separately;*
3. *The third point data is corrected using secondary data or commodity supply indicators of certain types of expenditure;*

4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Pofit Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb :

- a. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat.
- b. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga.
- c. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga.
- d. Kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus.

4. Obtained the 2010 PKRT value that has been adjusted;
5. Arrange an Implicit Index based on the City CPI (nearest Province/City);
6. Household final consumption expenditure based on constant 2010 prices is obtained by dividing the results of the 4th point with the results of the 5th point.

2.2 Final Consumption of Non-Profit Institutions Serving Household (NPISH)

The Non-Profit Institution that Serves Household Sector (NPISH) emerges as a separate sector in a regional economy. This sector plays a role in providing goods and services for its members and households for free or at a price level that is not economically meaningful. Economically meaningless prices mean that prices are usually below market prices (not following prevailing market prices).

NPISH is part of a non-profit organization (NPI). In accordance with its function, NPI is distinguished from NPI that serves households and NPIs that serve non-households.

NPI unit characteristics are as follows:

- a. NPI is generally a formal institution, but sometimes an informal institution whose existence is recognized by the community.
- b. Supervision of the organization is carried out by elected members who have the same rights, including the right to speak at the decision of the institution.
- c. Each member has certain responsibilities in the organization, and does not have the right to master profits or surpluses, because the profits derived from productive business activities are controlled by the institution.
- d. Institutional policy is decided collectively by elected members, and this group functions as the executor of the board.

- e. istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas tujuh jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non-pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi LNPRT adalah:

- a. Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SKLNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- e. the term *nonprofit* does not mean that this institution cannot create a surplus through its productive activities, but the surplus obtained is usually reinvested in similar activities.

NPISH is an institution that serves its members or households, and is not controlled by the government. Members of the institution referred to here are those who are not in the form of a business entity. NPISH is divided into seven types of institutions, namely: Community organizations, social organizations, professional organizations, social/cultural/sports/hobby associations, non-governmental organizations, religious institutions, and humanitarian aid/scholarship organizations.

The final consumption fo NPISH value is the same as the non-market output value produced by NPISH. The non-market output value is calculated based on the value of all NPISH expenditures in order to carry out its operational activities. The intended expenditure consists of:

- a. Consumption between, for example: purchase of stationery, printed materials, payment of electricity, water, telephone, telex, facsimile, costs of meetings, seminars, banquets, transportation, fuel, official travel, shopping for other goods and services, building rent, office equipment rental etc.*
 - b. Labor compensation, for example: wages, salaries, overtime, honoraria, bonuses and other benefits.*
 - c. Depreciation.*
 - d. Other taxes on production (minus subsidies), for example: UN, STNK, BBN etc.*
- Data sources used to estimate LNPRT are:*
- a. Results of Special Non-profit Institution Survey (SKLNP). The information obtained from the results of SKLNP is the average expenditure by type of institution and type of expenditure.*

- b. Hasil *updating* direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

c. Indeks Harga Konsumen (IHK)
PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Estimasi PK-LNPRT dengan menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{\bar{x}_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

b. The results of updating the NPISH directory. The information obtained from the results of updating the NPISH directory is the number of NPISH population by type of institution.

c. Consumer Price Index (CPI)

Final consumption of NPISH is estimated using the direct method, which uses the SKLNP results. Final consumption of NPISH estimation by calculating the average expenditure by type of institution and type of expenditure (goods and services). Goods and services obtained for free, the value is estimated to be in accordance with the prevailing market prices. The average agency expenditure by type is calculated by the following formula:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{\bar{x}_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Average expenditure by type of institution and type of expenditure

x_{ij} : Final consumption of NPISH survey results by type of institution and type of expenditure

n_i : The number of samples of NPISH by type of institution

i : Type of NPISH institution, $= 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Expenditure type NPISH, $= 1, 2, 3, \dots, 19$

Estimating Final consumption of NPISH, using the following formula: $X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$

X : Final consumption of NPISH is valid

N_i : NPISH population by type of institution

The results of the calculation above will be obtained by the amount of final consumption of NPISH based on the current price. Final consumption of NPISH on the basis of constant prices 2010, was obtained by defining final consumption of NPISH with the 2010 base year CPI.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

2.3 Government Final Consumption Expenditures

The government unit is an institutional unit that is formed through the political process, and has power in the fields of legislative, judicial and executive institutions of other institutional units within the boundaries of a country/region. The government also has various roles and other functions, such as providing goods and services to groups or individuals of households, as collectors and tax managers or other income, functioning to distribute income or welfare through transfer activities, and to engage in non-market production.

In an economy, government units can act as consumers and producers, as well as regulators who determine various policies in the fiscal and monetary fields. As consumers, the government will carry out consumption activities on final goods and services. Whereas as a producer, the government will conduct activities to produce goods & services and investment activities.

The magnitude of the value of government final consumption expenditure is the same as the production value of goods and services produced by the government for consumption by the government itself. PK-P includes the purchase of routine goods and services, payment of employee wages and salaries, social transfers in the form of goods, estimated depreciation of capital goods, and the value of output from Bank Indonesia, less the value of sales of goods and services produced by production units that cannot be separated from government activities.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

- a. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
- b. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

The activities of government production units that cannot be separated from general government activities include the following activities:

- a. Producing the same or similar goods as goods produced by the company. For example, the activity of printing publications, postcards, reproduction of art, plant nurseries in the experimental garden, etc. The activity of selling such items is incidental to the main functions of the government unit.*
- b. Producing services. For example, the activities of organizing hospitals, schools, colleges, museums, libraries, recreation places and storing works of art financed by the government. In this case the government charges a fee which is generally no more than all the costs incurred. Revenues received from such activities are referred to as non-commodity revenues (service revenues).*

The government sector consists of the central government and local governments. In carrying out its activities, the central government unit will refer to the State Budget (APBN) document, while the regional government units (both Provincial, District / City, and Village) refer to the Regional Government Revenue and Expenditure Budget.

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup:

- a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi.
- b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan.
- c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi.
- d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Dirjen Perbendaharaan Aceh)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Dinas Keuangan Aceh dan Dinas Keuangan Kabupaten/Kota)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

PK-P adh Berlaku=

Output non pasar-penjualan barang dan jasa + output Bank Indonesia

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyuutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri ditambah pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut ditambah pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut ditambah pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

Provincial final consumption consumption includes:

- a. *Government Consumption-Regency/City Government located in the province.*
- b. *Government Consumption-Provincial Government concerned.*
- c. *Government Consumption-Central Government which is part of the Provincial government.*
- d. *Government Consumption-Village/Village/Nagari Government in the relevant Province.*

The basic data used to calculate the Annual Provincial Government Final Consumption are:

- a. *Annual APBN realization data (Director General of Aceh Treasury)*
- b. *Data on annual APBD realization (Aceh Finance Office and District / City Finance Office)*
- c. *Regional Finance Statistics (BPS)*
- d. *Bank Indonesia (BI) Output*
- e. *Salary of Civil Servants (PNS) from the Ministry of Finance and the Price Index from BPS.*

In general, Applicable Government Consumption Expenditure is calculated using the following formula:

Government Consumption Expenditure at current prices=

Non-market-sales output of Bank Indonesia goods and services + output

Non-market output is calculated by the approach of costs incurred, namely expenditure on procurement of goods / services, social assistance in the form of goods (purchased at market prices), personnel expenditure, and depreciation.

For the Provincial, Provincial Government Consumption Expenditure levels at current prices, it is calculated based on the sum of the Provincial government's final consumption expenditure plus the final government consumption expenditure of all Regency / City governments in the Province plus the final expenditure of all village / kelurahan / nagari governments those in the province are added to the Central government expenditure which is part of the province concerned.

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Government consumption expenditure at fixed prices calculated using the deflation method. The deflator used was the general export price index (IHPB) without exports, the Wage Index, the Implicit Index of the Gross Domestic Product component of Gross Fixed Capital Formation, the General Consumer Price Index (CPI).

2.4 Gross Fixed Capital Formation (GFCF)

Investment activity is one of the main factors that will affect the economic development of a country / region. The investment here consists of physical investment and financial investment. In the context of GRDP, physical investment activity is reflected in the component of Gross Fixed Capital Formation (GFCF) and Inventory Change.

GFCF is closely related to the existence of fixed assets that are involved in the production process. Broadly speaking, fixed assets can be classified according to types of capital goods such as: buildings and other construction, machinery and equipment, vehicles, plants, livestock, and other capital goods.

GFCF is defined as the addition and reduction of fixed assets in a production unit, within a certain period of time. The addition of capital goods includes the procurement, manufacture, purchase, financial leasing of new domestic capital goods and new and used capital goods from abroad (including major repairs, transfers or barter of capital goods), and the growth of cultivated biological resources. Whereas the reduction of capital goods includes sales, transfers or barter, and leasing (financial leasing) of used capital goods on other parties. Exclusion of losses caused by natural disasters is not recorded as a reduction.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

PMTB terdiri dari :

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya.
- b. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan.
- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PMTB adalah:

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov./Kab. /Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level Provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level Provinsi.

Capital goods have a service life of more than one year, and will experience shrinkage over their lifetime. The term "gross" indicates that it still contains elements of depreciation. Depreciation or consumption of capital goods represents a decrease in the value of capital goods used in the production process normally during a period.

GFCF consists of:

- a. *Addition minus reduction in assets (assets) of both new and used goods, such as residential buildings, non-residential buildings, other buildings, machinery & equipment, transportation equipment, cultivated assets, plant intellectual property (intellectual property products), and so on.*
- b. *The cost of transferring ownership of non-financial assets that are not produced, such as land and patented assets.*
- c. *Major asset improvements, aimed at increasing production capacity and useful life (such as overhaul of production machinery, coastal reclamation, opening, drying and irrigation of forests, as well as prevention of floods and erosion).*

Data sources used to estimate GFCF are:

- a. *The output of the construction industry is the result of GRDP calculation according to the construction industry from the BPS Prov. /City.*
- b. *Imported 2-digit HS value, which is an imported capital goods from the local KPPBC (Office of Supervision and Customs Service).*
- c. *Medium Industrial Production Index from Small & Household Industry Statistics (Provincial level).*
- d. *Company financial statements.*
- e. *Publication of Provincial and Large-Scale Industry Statistics.*

- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "supply" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

- f. *IHPB from Statistics on Wholesale Trading Prices.*
- g. *Mining and Excavation Statistics Publications (oil and gas and non-oil and gas).*
- h. *Statistics on Electricity, Gas & Water Supply.*
- i. *Publication of Construction Statistics.*
- j. *Mineral Exploration Data from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).*
- k. *Animal Husbandry Statistics, Directorate General of Animal Husbandry.*

Calculation of GFCF can be done through direct or indirect methods, depending on the availability of data that may be obtained in their respective regions. The "direct" approach is by calculating the formation of capital (fixed assets) carried out by various economic sectors (producers) directly. Whereas the "indirect" approach is to calculate based on the allocation of the total supply of products (goods and services) that become capital goods in various industries, or referred to as the "commodity flow" approach. In this case the supply or "supply" of capital goods can come from domestic (domestic) production or from foreign products (imports).

GFCF calculation directly done by adding up all the value GFCF is happening in every industry (activities). Capital goods are valued on the basis of price (adh) purchase, includes all costs incurred, such as transportation costs, installation costs, taxes, and other costs associated with the procurement of capital goods. For capital goods that are imported in it, including customs duties and taxes associated with the procurement or transfer ownership of such capital goods.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "deflate" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu.

Basically the data for calculating GFCF directly can be obtained from the company's financial statements. The data provided include information/data on changes in fixed assets (GFCF) were assessed adh force or the purchase price (acquisition). To obtain the value of GFCF adh Constant, the GFCF of the at constant market prices in the "deflate" (divided) by the wholesale price index (WPI) in accordance with the capital goods.

Calculation of GFCF in an indirect way, referred to as the commodity flow approach (commodity flow approach). This approach is done by calculating the value of the supply of goods produced by various industries (supply), which later became part of which was allocated for capital goods. Calculation of GFCF in the form of the building, carried out using a specific ratio of the value of output of the construction industry, both at current market prices or at constant market prices.

Calculation of GFCF in the form of machinery, transport equipment and other capital goods are distinguished on capital goods originating from domestic production and from imports. For domestic capital goods, can be obtained in two ways. First, by allocating output of machinery, transport equipment and other capital goods into capital formation. This value is still to be added to the cost of transport and trading margin, in order to obtain GFCF adh Applicable. To obtain the value adh Constant is setting deflate GFCF (at current market prices) with WPI in accordance with the type of capital goods.

The second approach, which should be done when the data output is not available is by way of "extrapolation" or GFCF at basis price multiplying the production index corresponding types of capital goods. For the calculation of GFCF begins with calculating the constant price first.

Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "reflate"(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap. Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Ke dua, untuk memperoleh PMTB adh konstan adalah dengan cara men"deflate" PMTB adh berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Furthermore, to obtain GFCF at current price, the GFCF value is constant in "reflate" (multiplied) by the price index of each type of capital goods that are appropriate (as an inflator). This requires that GFCF at constant price in the previous years be fully available. Calculation of GFCF in the form of machinery, transportation equipment and other capital goods originating from imports, is carried out using 2 (two) methods.

First, GFCF is valid obtained from the total value of imported goods. Furthermore, the capital goods are detailed according to the main groups such as machinery, transportation equipment and other capital goods. If the details are not available, certain ratios can be used as allocators (2-digit HS code imported capital goods). Secondly, to obtain GFCF is Constant is to "deflate" GFCF and apply by using the appropriate price index.

GFCF at current price for intangible capital goods such as mineral exploration, calculated by collecting data on financial statements of public companies in the mining industry. By using panel data, the growth is valid. The validity of mining activities is a multiplier in the value of mineral exploration in the previous period. Whereas GFCF is constant, it is obtained by deflating the value of the Adj. Applicable to the implicit index of the GRDP of the mining industry. In addition, data from ESDM and BP Migas are expected to be the basis or control data for annual data.

For software, GFCF is valid by collecting data on open company financial statements in the software field. For ADH Constant is obtained by deflating the value is valid with the implicit index of the company service industry.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original, data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tidak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 Perubahan Inventori

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

GFCF calculation of entertainment, literature and original art works, data collected is the value of soap operas and television programs that can be made. Whereas film import data is obtained from film import values. The GFCF is constant, obtained by defining the value of the adh applicable with the implicit index of the entertainment service industry and IHPB of imported goods.

There are several problems that occur in calculating GFCF through an indirect approach (commodity flow), namely:

- a. The ratio of the use of industrial output to capital goods tends to be static. To improve a large scale survey is needed.*
- b. Trade and transport margin values are difficult to obtain.*
- c. Lag time between the year of measurement data (reference) and publication data obtained from certain data sources, too long.*

2.5 Change in Inventory

In economic activities, inventory functions as one of the components needed for the sustainability of the production process, in addition to labor and capital goods. In GRDP, the Inventory Change component is part of Gross Capital Formation, or better known as physical investment that occurs in a certain period of time in a region. Inventory changes represent part of investments realized in the form of finished goods, semi-finished goods, and raw materials and auxiliary materials for a certain period. The availability of inventory change data is important to meet the analysis needs of investment activities.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses penggerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

A simple understanding of inventory (inventory) is goods that are controlled by the producer for the purpose of being processed further (intermediate consumption) into goods in other forms, which have economic value and a higher value of benefits. Included in this definition are goods that are still in the process of work (progress in progress), as well as finished goods that have not been marketed and are still controlled by the producer.

Inventory changes are the difference between the inventory value at the end of the accounting period and the inventory value at the beginning of the accounting period. Inventory changes explain changes in inventory position, which can mean an increase (positive sign) or a reduction (negative sign).

For producers, the existence of inventories is needed to maintain the continuity of the production process, so that it is necessary to reserve both in the form of raw materials or auxiliary materials. Uncertainty caused by external influences is also a factor of consideration for employers to make reserves (especially raw materials). For traders, procurement of inventory is more influenced by speculative elements in the hope of obtaining greater profits. As for the government, reserve policies, especially strategic commodities, are primarily aimed at maintaining economic, political and social stability. Because it concerns the interests of the wider public (public), there needs to be a reserve for several staple commodities such as rice, flour, cooking oil and sugar. For households, the procurement of inventory is aimed more at the ease of managing their consumption behavior.

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual. Ternak untuk tujuan dipotong.
- f. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.
- g. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD.
- c. Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian.
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- e. Data komoditas perkebunan.
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih.
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB).

Inventories can be classified according to the type of goods as follows:

- a. *Inventories by industry, such as products or crops, forestry, fisheries, mining, processing industries, city gas, clean water, and construction.*
- b. *Various types of raw & auxiliary materials (materials & supplies), namely all materials, components or supplies for further processing into finished goods.*
- c. *Finished goods, which are goods that have been processed but have not been sold or have not been used, including goods sold in the same form as when they were purchased.*
- d. *Semi-finished goods, namely goods that have been partially processed or not finished (not including unfinished construction).*
- e. *Merchandise that is still controlled by wholesalers and retailers for sale purposes. Livestock for the purpose of cutting.*
- f. *Procurement of goods by the merchant for the purpose of being sold or used as fuel or supplies.*
- g. *Inventory to the government, which includes strategic items such as rice, soybeans, sugar, and wheat.*

Data sources used for calculating inventory change components are:

- a. *Financial reports of related companies from surveys or downloading the Indonesia Stock Exchange website (www.idx.co.id);*
- b. *Financial Statements of BUMN / BUMD Companies.*
- c. *Mining commodity data from mining and quarry statistics publication.*
- d. *Annual Publication Inventory Data for Large Medium Industries.*
- e. *Plantation commodity data.*
- f. *The selected industrial GDP implicit price index.*
- g. *Large trade price index (IHPB).*

- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan adalah sbb:

- a. Menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun.
- b. Menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya.
- c. Menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

- h. Other external data, such as rice preparation data from the Bureau of Logistics, cement data from the Indonesian Cement Association (ASI), sugar from the Indonesian Sugar Board (DGI), and livestock from the Ministry of Agriculture's Ditjennak.

The method used in the inventory process is direct approach and indirect approach. The direct approach is an approach from the "corporate" side, while the indirect approach is from the "commodity" side.

In terms of its benefits, it directly produces relatively better data with indirect results. The approach can only be done if the inventory position data is available in detail and continuously.

By using a direct approach, an inventory value will be obtained at a certain time (usually at the end of the year). The main data source is the company's year-end report (*balance sheet*). For inventory requirements, there is an inventory data in consecutive years. The inventory calculation steps from the financial statements are as follows:

- a. Calculate inventory and constant positions, by defining initial and final stock with IHPB at the end of the year.
- b. Produce inventory and Constant by reducing the position in the current year with the previous year.
- c. Generate more than one way to apply it with Constant annual average IHPB.

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan:

- a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai
- b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah:

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan.
- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya.
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai.
- d. Diperlukan *adjustment* dengan cara me-mark-up, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 Ekspor Impor

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas eksport impor.

An indirect approach is also called a commodity flow approach. The main data used is the volume and price of each inventory item. The value of inventory changes is valid by calculating the change in the final stock volume and the initial stock multiplied by the average purchase price, or the selling price if the purchase price data is not available. Constant adh inventory changes are calculated by:

- a. deflate the value of inventory changes is valid with the appropriate price index
- b. multiplying the change in the final stock volume and the initial stock multiplied by the price of the item in the base year.

The limitations and problems faced in calculating Inventory Change components are:

- a. Inventory data needed is in the form of positions or at one time for consecutive time periods.
- b. Not all inventory commodities have volume and price data available.
- c. Inventory change data available in the form of volume is generally not accompanied by price data. If inventory price data is not available, it can be assumed that the inventory commodity price index follows the corresponding GDP implicit index.
- d. Adjustments are needed by marking up, in order to complete estimates for industries where data is not available.

2.6 Import Export

Export-import activity in a region is believed to have occurred for a long time, even before the region was designated as a government area. The variety of goods and services produced and price disparity are the main factors in the emergence of export-import activities.

Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut.
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut. Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$).
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$).
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI.
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan.

Regions that cannot meet their own needs try to bring in from other regions or even countries. On the other hand, regions that produce goods and services exceed domestic needs, are encouraged to expand markets outside the region or even abroad.

Along with the times, production activities and public demand for goods and services are increasing and diverse. Progress in the field of transportation and communication also helped smooth the flow of goods and services distribution. These conditions further encourage export-import activities in a region to become more developed.

Export-import in a region is defined as the transfer of ownership of the economy (whether sales / purchases, barter, gifts or grants) of goods and services between residents of the region and non-residents outside the area.

Export-Import in an area consists of:

- a. *Export / import of goods from / to foreign countries to / from the province.*
- b. *Export / import services from / to foreign countries to / from the province. Coverage of services includes transportation, insurance, communication, tourism and other services*
- c. *Net exports between regions*
 - Exports between regions
 - Imports between regions

The data sources used to estimate PKRT are:

- a. *Statistics of Goods Export Notification (PEB) from BPS (in US \$).*
- b. *Statistics of Goods Import Notification Statistics (PIB) from BPS (in US \$).*
- c. *Indonesia's Balance of Payments from BI.*
- d. *Simopel Report, which is a report (monthly) loading and unloading of goods at the port.*

- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang.
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

Ekspor-Import barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

e. Information on the traffic of goods in and out of the province at weigh stations.

f. Traffic information of goods in and out of the province from the survey results.

g. Weighted average transaction rates from Bank Indonesia.

Export-Import of foreign goods is assessed according to the price of free on board (FOB) in US \$. Calculation of foreign goods exports is carried out by multiplying the value of the goods (according to PEB) with the buying transaction rate of the weighted average. While foreign goods imports are carried out by multiplying the value of goods (according to PIB) with the weighted average selling transaction rate. The value of export-import services comes from Indonesia's Balance of Payments (BOP) issued by Bank Indonesia. Besides that, the export-import value is still added / reduced by the value of direct purchase and undocumented transactions by both residents and non-residents. While net exports between regions are the residual value (residual) between the GRDP of the business field and the expenditure GRDP.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELOUARAN

III. TINJAUAN PEREKONOMIAN BERDASARKAN PDRB MENURUT PENGELOUARAN

3.1 Tinjauan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran

3.1.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut pengeluaran selama tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, nilai PDRB sebesar 921,15 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 991,65 miliar rupiah, lalu meningkat lagi pada tahun 2015 berikutnya menjadi 1,07 triliun rupiah. Pada tahun 2016, tercatat PDRB ADHB menurut pengeluaran sebesar 1,16 triliun rupiah dan meningkat menjadi 1,27 triliun rupiah pada tahun 2017.

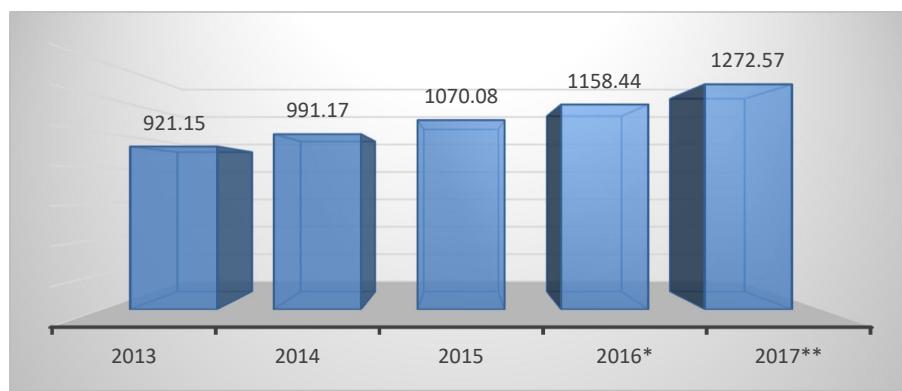
III. ECONOMIC REVIEW BASED ON GRDP BY EXPENDITURE

3.1 Aggregate Review of GRDP by Expenditure

3.1.1 GRDP at Current Prices and on the basis of Constant 2010 Prices

The development of GRDP value based on current prices (ADHB) according to expenditure during 2013-2017 has increased from year to year. In 2013, the GRDP amounted to 921,15 billion rupiah. Then in 2014 it rose to IDR 991,65 billion, then increased again in the following year to IDR 1,07 billion. In 2016, the ADHB GRDP was recorded according to expenditure of IDR 1,16 billion and increased to IDR 1,27 billion in 2017.

Gambar 3. 1 Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2013-2017
Figure 3. 1 Gross Regional Domestic Product by Expenditure at Current Prices (Billion Rupiah), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

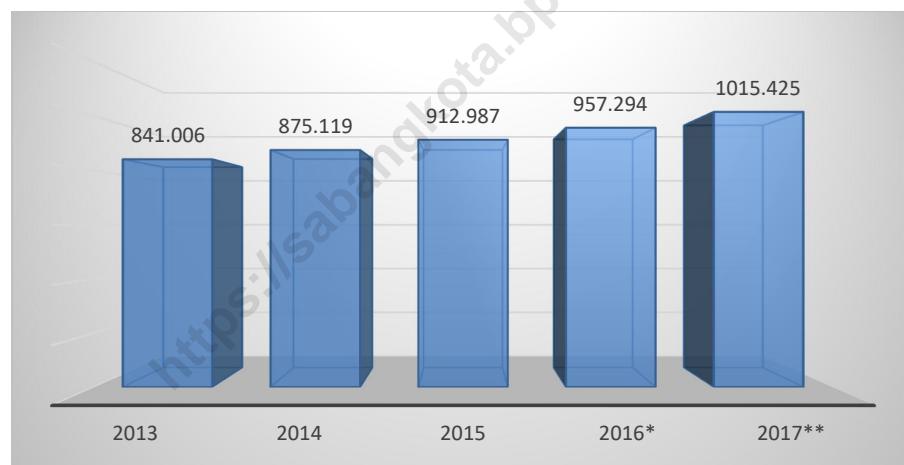
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Seiring dengan peningkatan nilai PDRB ADHB, nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kota Sabang juga menunjukkan tren peningkatan selama periode 2013-2017. Nilai PDRB ADHK 2010 tercatat sebesar 841,006 miliar rupiah pada tahun 2013. Pada tahun 2014, tercatat nilai PDRB ADHK Kota Sabang meningkat menjadi sebesar 875,12 miliar rupiah. Pada tahun berikutnya meningkat lagi menjadi 912,99 miliar rupiah dan pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 957,29 miliar rupiah. Selanjutnya terjadi peningkatan kembali pada tahun 2017 menjadi 1,015 triliun rupiah.

Along with the increase in the value of the ADHB GRDP, the GRDP value based on constant prices (ADHK) of Sabang City also showed an increasing trend during the 2013-2017 period. The 2010 ADHK GRDP value was recorded at IDR 841,006 billion in 2013. In 2014, Sabang's Regency ADHK GRDP recorded an increase of IDR 875,12 billion. In the following year it increased again to IDR 912,99 billion and in 2016 it increased again to IDR 957,29 billion. Furthermore, there was an increase again in 2017 to IDR 1,015 trillion.

Gambar 3. 2 Produk Domestik Regional Bruto ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2013-2017

Figure 3. 2 Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Prices by Expenditure (Billion Rupiah), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi, akan lebih efektif jika menggunakan pertumbuhan PDRB ADHK. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, laju pertumbuhan ekonomi ADHK tidak dipengaruhi oleh unsur harga. Harga pada ADHK bersifat tetap dan harga yang digunakan pada publikasi ini adalah tahun 2010 sebagai tahun dasar yang terbaru.

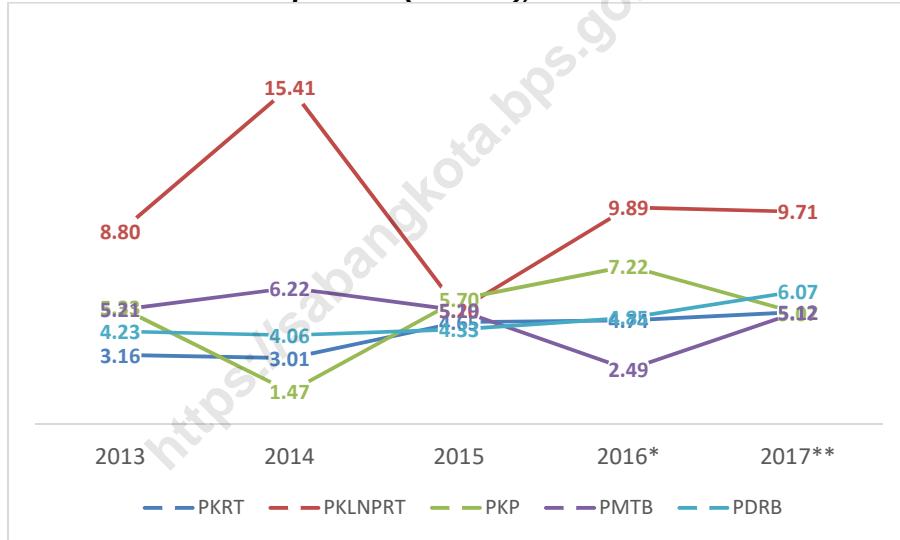
3.1.2 Economic Growth

To see the pace of economic growth, it will be more effective to use ADHK GRDP growth. As previously explained, the economic growth rate of ADHK is not influenced by the price element. Prices on ADHK are fixed and the prices used in this publication are 2010 as the latest base year.

Secara umum laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 pada periode 2013-2017 mengalami peningkatan dengan nilai yang positif. Pertumbuhan ekonomi Kota Sabang pada tahun 2013 sebesar 4,23 persen dan sedikit melambat menjadi 4,06 persen di tahun 2014. Pada tahun berikutnya, terjadi peningkatan laju pertumbuhan menjadi 4,33 persen. Pada tahun 2016 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,85 persen. Kemudian pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi sebesar 6,07 persen.

In general, the 2010 constant prices GRDP growth rate in the 2013-2017 period increased with a positive value. Sabang City's economic growth in 2013 was 4.23 percent and slightly slowed to 4.06 percent in 2014. In the following year, there was an increase in the growth rate to 4.33 percent. In 2016, economic growth was recorded at 4.85 percent. Then in 2017 it increased again to 6.07 percent.

Gambar 3. 3 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Komponen Pengeluaran (Persen), 2013-2017
Figure 3. 3 Growth Rate of 2010 ADHK GRDP According to Expenditure Components (Percent), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Jika dilihat berdasarkan rincian komponen pengeluaran, pada tahun 2017 komponen yang paling tinggi pertumbuhannya adalah komponen Pengeluaran Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga (PKLNPR) dengan pertumbuhan mencapai 9,71 persen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan lembaga non profit sebelum dan sesudah pemilukada yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2017.

When viewed based on the details of expenditure components, in 2017 the highest component of growth was the Expenditures of Final Consumption of Non-Profit Institutions Serving Household (NPISH) with growth reaching 9.71 percent. This is due to the many activities carried out by non-profit institutions before and after the post-conflict local election which was held in February 2017.

Disusul di tempat kedua oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dengan pertumbuhan sebesar 5,12 persen. Selanjutnya, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) dengan pertumbuhan sebesar 5,02 persen.

Komponen yang pergerakan pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan PDRB dalam periode 2013-2017 adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, sementara komponen yang mengalami pertumbuhan yang cenderung berfluktuatif adalah Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani Rumah Tangga yang mengalami tren perlambatan pertumbuhan dari 15,41 persen pada tahun 2014 menjadi 5,70 pada tahun 2015.

3.1.3 Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran

Sebagaimana struktur ekonomi di sebagian besar wilayah, struktur perekonomian Kota Sabang masih di dominasi oleh konsumsi rumah tangga. Lebih dari separuh aktivitas ekonomi berhubungan dengan konsumsi pemerintah yaitu sebesar 98,59 persen di tahun 2017 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 87,14 persen. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kota Sabang dalam kurun waktu lima tahun masih sangat bergantung pada sektor administrasi pemerintahan. Peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam struktur ekonomi tahun 2017 sebesar 80,45 persen dan menjadi komponen dengan sumbangan terhadap PDRB Kota Sabang terbesar kedua setelah Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

Followed in second place by the Gross Fixed Capital Formation component (GFCF) and the components of Household Consumption Expenditures amounted to 5.12 percent and components of Government Consumption Expenditures with growth of 5.02 percent.

Components whose growth movements are in line with GRDP growth in the 2013-2017 period are Household Consumption Expenditures, while the component that experienced growth which tends to fluctuate is Expenditures of Final Consumption of Non-Profit Institutions Serving Household (NPISH) which experienced a trend of slowing growth from 15.41 percent in 2014 to 5.70 percent in 2015.

3.1.3 Percent Distribution of GRDP by Expenditure

Like the economic structure in most regions, the economic structure of Sabang City is still dominated by household consumption. More than half of economic activity is related to household consumption, which is 98.59 percent in 2017 decreased when compared to 2013 which was 87.14 percent. This shows that economic activities in Sabang City within five years still very dependent on the government administration sector. The role of Gross Fixed Capital Formation (GFCF) in the 2017 economic structure is 80.45 percent and is a component with the contribution to the second largest Sabang City GRDP after Government Consumption Expenditures.

Pengeluaran Konsumsi rumah Tangga menduduki posisi ketiga dengan sumbangan sebesar 55,93 persen pada tahun 2017. Sedangkan untuk komponen Konsumsi Lembaga Non-Profit Melayani Rumah Tangga dan Perubahan Inventori hanya menyumbang peranan dibawah 6 persen terhadap perekonomian Kota Sabang.

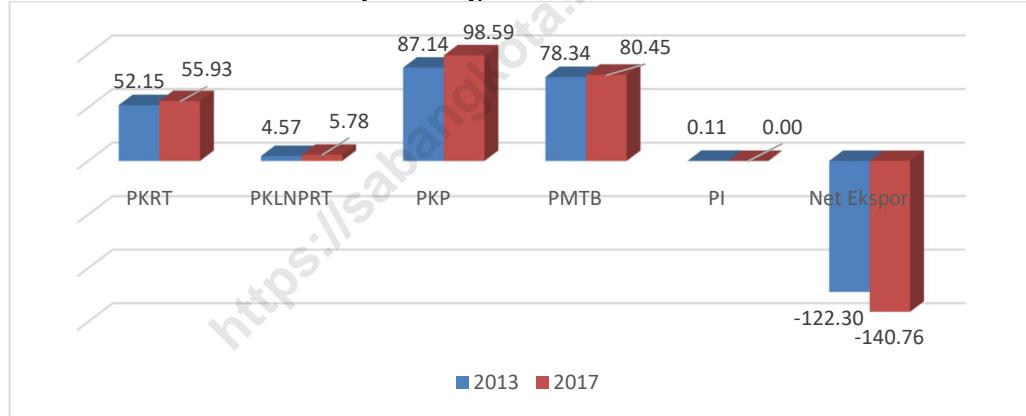
Dari keenam komponen pengeluaran hanya komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan perubahan inventori yang kontribusinya menurun pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2013, sementara komponen lainnya mengalami peningkatan.

Government Consumption Expenditures occupied the third position with a contribution of 55.93 percent in 2017. As for the Consumption component of Non-Profit Institutions Serving Households and Inventory Change only contributed a role below 6 percent to the economy of Sabang City.

From the six components of expenditure only the components of Inventory Changes whose contribution decreased in 2017 when compared to 2013, while other components experienced an increase.

Gambar 3. 4 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen), 2013 dan 2017

Figure 3. 4 Percentage Distribution of GRDP at Current Prices by Expenditures (Percent), 2013 and 2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.1.4 Indeks Harga Implisit dan Laju Indeks Harga Implisit

Indeks implisit merupakan rasio perbandingan antara PDRB ADHB dengan PDRB ADHK 2010. Karena digunakan sebagai tahun dasar baru, indeks implisit PDRB tahun 2010 sudah pasti bernilai 100. Ini menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB sama dengan nilai PDRB ADHK di tahun 2010. Indeks implisit ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun searah dengan kenaikan harga. Dengan menggunakan tahun dasar 2010, indeks implisit PDRB di tahun 2013 naik menjadi 109,53.

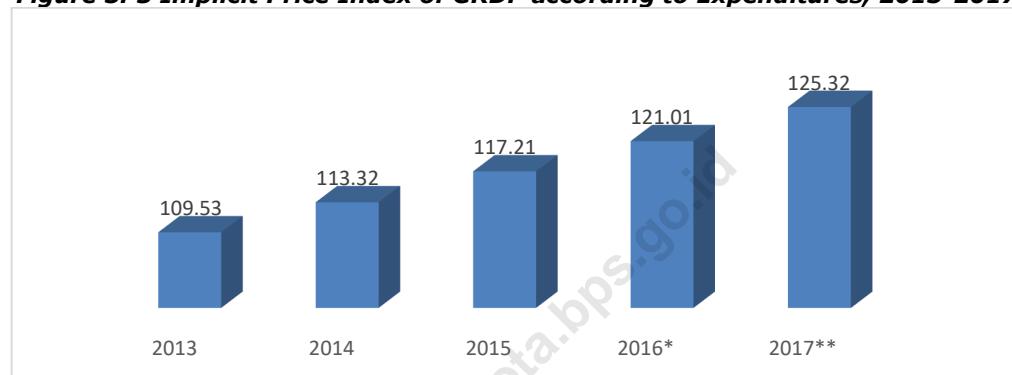
3.1.4 Implicit Price Index and Implicit Price Index Rate

The implicit index is the comparison ratio between GRDP at current prices and GRDP at 2010 constant prices. Because it is used as a new base year, the GRDP implicit index in 2010 is definitely worth 100. This shows that the GRDP at current prices value is the same as the GRDP at constant prices value in 2010. This implicit index will continue increasing from year to year in line with rising prices. By using the 2010 base year, the GRDP implicit index in 2013 rose to 109.53.

Kemudian, naik menjadi 113,32 pada tahun 2014. Indeks ini kembali meningkat di tahun 2015 yaitu menjadi sebesar 117,21 dan terus meningkat hingga sebesar 121,01 di tahun 2016 dan sebesar 125,32 pada tahun 2017. Angka ini menunjukkan bahwa perbandingan harga tahun 2017 dengan harga tahun dasar (2010) mencapai 1,25 kali.

Then, it rose to 113.32 in 2014. This index increased again in 2015 to 117.21 and continued to increase to 121.01 in 2016 and 125.32 in 2017. This figure shows that the price comparison in 2017 with base year prices (2010) reaching 1.25 times.

Gambar 3. 5 Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, 2013-2017
Figure 3. 5 Implicit Price Index of GRDP according to Expenditures, 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Laju indeks implisit PDRB dari tahun 2013-2017 secara umum terus mengalami peningkatan. Laju indeks implisit pada tahun 2013 sebesar 3,10 persen, kemudian meningkat menjadi 3,46 persen pada tahun 2014. Laju indeks implisit melambat menjadi 3,43 persen di tahun 2015 lalu melambat kembali menjadi 3,25 persen pada 2016. Selanjutnya pada tahun 2017 terjadi peningkatan, yaitu menjadi 3,56 persen.

The GRDP implicit index rate from 2013-2017 in general continued to increase. The implicit index rate in 2013 was 3.10 percent, then increased to 3.46 percent in 2014. The implicit index rate slowed to 3.43 percent in 2015 and then slowed again to 3.25 percent in 2016. Next to in 2017 there was an increased, which was 3.56 percent.

Gambar 3. 6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Menurut Pengeluaran (Persen), 2013-2017
Figure 3. 6 Growth Rate of Implicit Price Index of GRDP according to Expenditures (Percent), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.2 Konsumsi Rumah Tangga

3.2.1 Distribusi Persentase ADHB

Selama kurun waktu lima tahun dari 2013-2017 kontribusi konsumsi rumah tangga secara umum terus mengalami kenaikan, dari 52,15 persen pada tahun 2013 hingga mencapai 55,93 persen di tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kota Sabang dalam kurun waktu lima tahun sudah mulai berkembang karena daya beli masyarakatnya sudah meningkat terlihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat sehingga kegiatan ekonomi di Kota Sabang juga lebih baik.

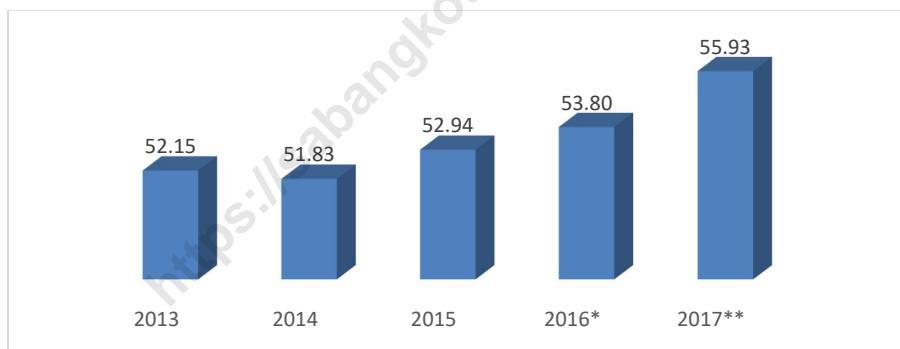
3.2 Household Consumption

3.2.1 Percentage Distribution at Current Prices

During the period of five years from 2013-2017 the contribution of household consumption continued to increase, from 55.93 percent in 2013 to reach 74.49 percent in 2017. This shows that economic activities in Sabang City within five years have been began to develop because the purchasing power of the people has increased as seen from increased household consumption expenditure so that economic activity in the city of Sabang is also better.

Gambar 3. 7 Distribusi Persentase Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Persen), 2013-2017

Figure 3. 7 Percentage Distribution of Household Consumption Components At Current Prices (Percent), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

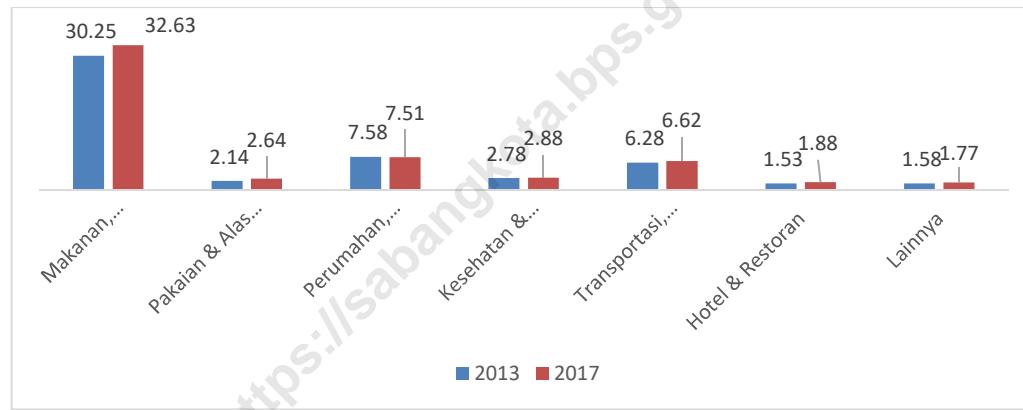
Dari jumlah 55,93 persen konsumsi rumah tangga pada tahun 2017, sebanyak 32,63 persennya digunakan untuk pembelian kebutuhan makanan dan minuman non beralkohol. Sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan hanya sebesar 2,88 persen, angka ini sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu 2,78 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabang belum banyak menggunakan konsumsi rumah tangganya untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanan.

From the total 55.93 percent of household consumption in 2017, 32.63 percent was used to purchase food and beverages non alcoholic. As for health, only 2.88 percent, this figure is slightly bigger compared to 2013, which was 2.78 percent. This condition shows that the Sabang community has not used much of their household consumption to improve the quality of human resources and is still focused on meeting food needs.

Kontribusi subkomponen kedua terbesar terhadap komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah perumahan, air , listrik, gas, dan bahan bakar lainnya yaitu sebesar 7,51 persen pada tahun 2017, sedikit menurun dari tahun 2013 yang sebesar 7,58 persen. Sementara subkomponen yang berkontribusi paling kecil adalah pengeluaran konsumsi untuk barang pribadi dan jasa perorangan yaitu sebesar 1,77 persen pada tahun 2013 dan sedikit meningkat menjadi 1,58 persen pada tahun 2017.

The contribution of the second largest subcomponent to the components of household consumption expenditure was housing, water, electricity, gas, and other fuels, which amounted to 7.51 percent in 2017, a slight decrease from 2013 which was 7.58 percent. While the subcomponents that contributed the least were consumption expenditure for personal items and personal services which amounted to 1.77 percent in 2013 and slightly increased to 1.58 percent in 2017.

Gambar 3. 8 Distribusi Persentase Subkomponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Persen), 2013 dan 2017
Figure 3. 8 Percentage Distribution of Household Consumption Components at Current Prices (Percent), 2013 and 2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.2.2 Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) Kota Sabang relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,71 persen pada tahun 2013-2017. Laju Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun 2017 tercatat sebesar 5,12 persen, sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan di tahun 2016 yang tercatat sebesar 4,74 persen. Penurunan laju pertumbuhan ini di dorong oleh meningkatnya pertumbuhan di seluruh subkomponen PKRT.

3.2.2 Growth Rate

Growth rate of Household Final Consumption Expenditures of Sabang City is relatively stable with an average growth of 4.71 percent in 2013-2017. Rate Household consumption growth in 2017 was recorded at 5.12 percent, slightly higher than the growth in 2016 which was recorded at 4.74 percent. The decline in the rate of growth was driven by inclining growth in all Household Final Consumption Expenditures subcomponents.

Tabel 3. 1 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHK 2010
Table 3. 1 Growth Rate of the 2010 Constant Prices of Household Consumption Component

Komponen/Component	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,16	3,01	4,65	4,74	5,12
a. Makanan, Minuman & Rokok	2.82	2.34	5.62	4.74	5.74
b. Pakaian & Alas Kaki	3.38	3.67	4.05	6.19	6.60
c. Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.78	4.56	3.76	4.85	2.62
d. Kesehatan & Pendidikan	3.77	2.73	3.57	3.78	4.24
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	3.28	4.23	2.26	4.79	5.17
f. Hotel & Restoran	3.90	3.59	3.02	4.94	5.74
g. Lainnya	4.65	3.23	3.45	3.57	3.46

* Angka sementara/Preliminary Figure

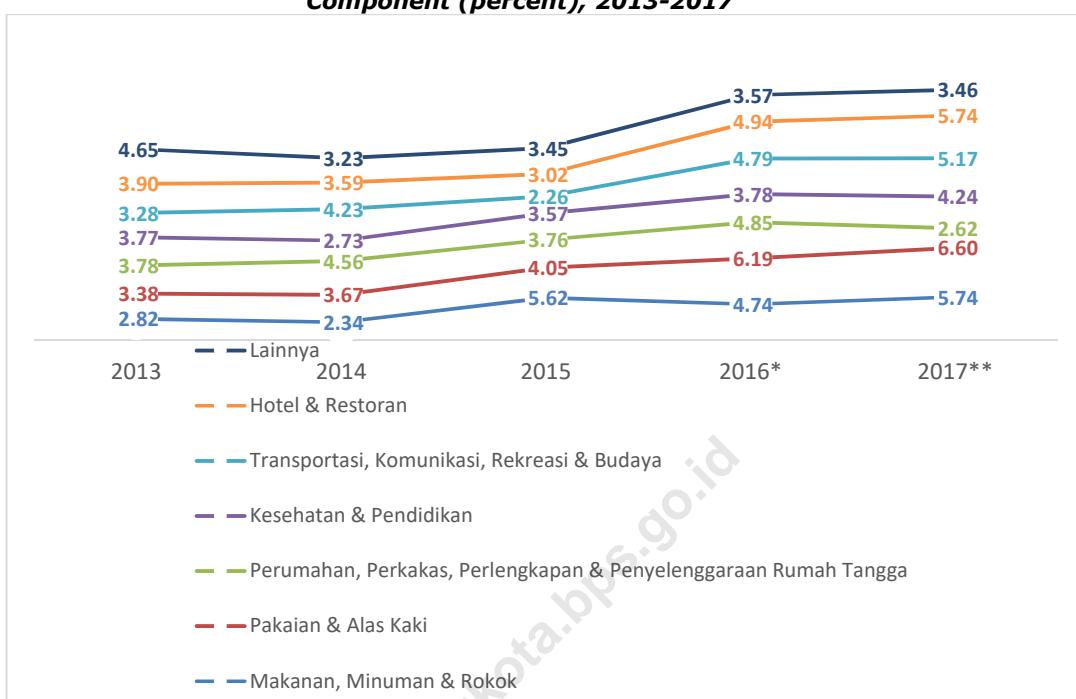
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Bila dilihat berdasarkan subkomponen di tahun 2017, subkomponen Pakaian dan Alas Kaki memiliki pertumbuhan yang paling tinggi bila dibandingkan dengan subkomponen lainnya yaitu dengan pertumbuhan sebesar 6,60 persen. Sementara pertumbuhan terendah dimiliki oleh subkomponen Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga dengan pertumbuhan hanya sebesar 2,62 persen.

When viewed based on the subcomponents in 2017, the Clothing and Footwear subcomponent has the highest growth compared to other subcomponents, with growth of 6.60 percent. While the lowest growth is owned by Housing, Tools, Equipment & Household Implementation subcomponents with growth of only 2.62 percent.

Gambar 3. 9 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHK 2010 (persen), 2013-2017

Figure 3. 9 Growth Rate of the 2010 Constant Prices of Household Consumption Component (percent), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.2.3 Laju Indeks Implisit

Hal yang erat kaitannya dengan tingkat konsumsi rumah tangga adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi dari konsumsi rumah tangga dan subkomponen pembentuknya masih dikatakan ringan, hal ini terlihat dari laju indeks implisitnya yang digambarkan dengan laju indeks implisitnya. Secara umum tingkat inflasi konsumsi rumah tangga Kota Sabang masih dibawah 10 persen. Tingkat inflasi tertinggi pada periode 2013-2017 terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 8,64 persen, yang didorong dengan meningkatnya harga-harga pada subkomponen Penginapan dan Hotel yaitu sebesar 11,09 persen.

Tingkat inflasi konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 adalah sebesar 8,64 persen, ini berarti terjadi kenaikan harga-harga di Kota Sabang untuk konsumsi rumah tangga sebesar 3,59 persen dari tahun 2016.

3.2.3 Implicit Index Rate

What is closely related to the level of household consumption is the level of inflation or the rate of increase in prices. The inflation rate of household consumption and its constituent subcomponents is illustrated by the rate of the implicit index. In general, the inflation rate of Sabang City household consumption is still said to be mild, this can be seen from the rate of the implicit index which is still below 10 percent. The highest inflation rate in the 2013-2017 period occurred in 2017 at 8.64 percent, which was driven by rising prices on the Hotel and Accommodation subcomponents, which amounted to 11.09 percent.

The inflation rate of household consumption in 2017 was 8.64 percent, this means that there was an increase in prices in Sabang Regency for household consumption by 3.59 percent from 2016.

Tabel 3. 2 Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Komponen Konsumsi Rumah Tangga (Persen), 2013-2017
Table 3. 2 Implicit Index Growth Rate of Household Consumption Components (Percent), 2013-2017

Komponen/Component	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.08	3.87	5.32	5.05	8.64
a. Makanan, Minuman & Rokok	3.33	3.21	5.24	4.06	10.13
b. Pakaian & Alas Kaki	4.02	8.91	6.74	9.71	9.42
c. Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.97	0.53	4.67	5.46	5.68
d. Kesehatan & Pendidikan	4.36	4.03	4.55	7.49	6.46
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	7.01	7.24	4.99	4.76	5.15
f. Hotel & Restoran	4.18	8.48	8.36	9.26	11.09
g. Lainnya	7.10	6.72	8.80	7.60	7.92

* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.2.4 Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang menggambarkan besarnya pendapatan yang dibelanjakan. Untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi perorangan di suatu wilayah, perlu adanya nilai konsumsi rumah tangga perkapita.

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita di Kota Sabang dalam kurun waktu 2013-2017 terus meningkat, ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan.

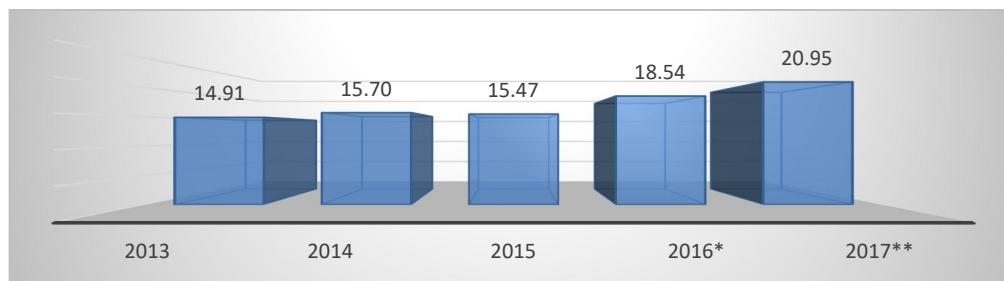
3.2.4 Consumption of households per capita

Household consumption expenditure is one of the macroeconomic variables that describes the amount of income spent. To get an idea of the average level of individual consumption in an area, there needs to be a value of per capita household consumption.

The value of per capita household consumption in Sabang in the period 2013-2017 continues to increase, this indicates an increase in the average purchasing power of the population which is also an indication of an increase in average income

Gambar 3. 10 Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (Juta Rupiah), 2013-2017

Figure 3. 10 Value of Per Capita Household Consumption Components at Current Prices (Million Rupiah), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

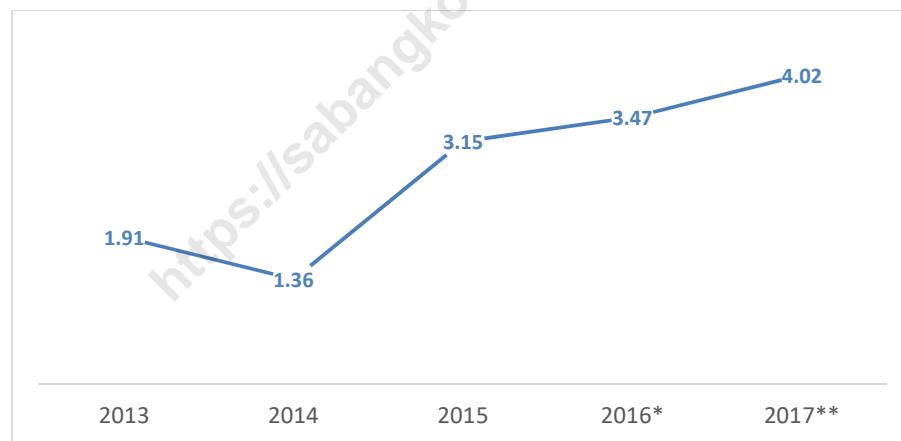
Selain pendapatan, peningkatan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, diantaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Nilai konsumsi masyarakat pada tahun 2017 sebesar 20,95 juta rupiah menunjukkan bahwa pada tahun 2017, rata-rata konsumsi per penduduk Kota Sabang adalah sebesar 20,95 juta rupiah dalam satu tahun. Sedangkan jika dilihat dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga perkapita juga menunjukkan tren peningkatan dimana pertumbuhan paling tinggi di tahun 2017 yaitu sebesar 4,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Besides the income, the increase in the value of household consumption is also influenced by many other factors, including the level of inflation and changes in people's lifestyles. The value of public consumption in 2017 of 20.95 million rupiah shows that in 2017, the average consumption per resident Sabang City population was 20.95 million rupiah in one year. Whereas when viewed from the rate of growth of household consumption per capita also shows an increasing trend where the highest growth in 2017 was 4.02 percent compared to the previous year.

Gambar 3. 11 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

ADHB (Persen), 2013-2017

Figure 3. 11 Growth Rate of Per Capita Household Consumption Components at Current Prices (Percent), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.3 Konsumsi Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB Kota Sabang masih sangat kecil bila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Meskipun terus mengalami peningkatan, dalam kurun waktu lima tahun (2013-2017) rata-rata kontribusi komponen ini masih kurang dari 10 persen. Sehingga belum bisa dikatakan bahwa komponen ini sebagai motor penggerak perekonomian Kota Sabang. Tercatat dari tahun 2013-2017 kontribusi tertinggi konsumsi LNPRT hanya sebesar 5,78 persen di tahun 2017.

3.3 Consumption of Non-profit Institutions that Serve Households (NPISH)

The role of final consumption of NPISH in the Sabang City GRDP is still very small when compared to other expenditure components. Even though it continues to increase, in the period of five years (2013-2017) the average contribution of this component is still less than 10 percent. So that it cannot be said that this component is the driving force of Sabang's economy. Recorded from 2013-2017 the highest contribution of NPISH consumption was only 5.78 percent in 2017.

Gambar 3. 12 Distribusi Persentase Komponen Konsumsi LNPRT ADHB (Persen), 2013-2017

Figure 3. 12 Percentage Distribution of Consumption Components of NPISH at Current Prices (Percent), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

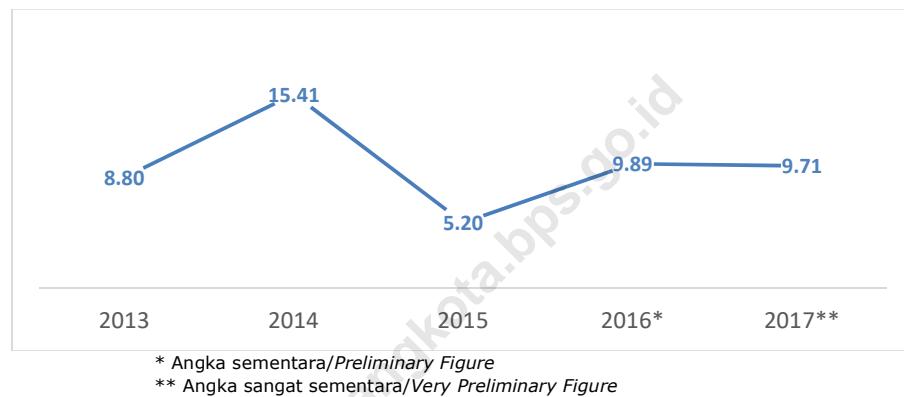
Meskipun kontribusinya terhadap PDRB rendah, namun komponen pengeluaran LNPRT menunjukkan pertumbuhan. Laju pertumbuhan konsumsi LNPRT dari tahun ke tahun mengalami kecenderungan yang meningkat. Terlihat adanya kenaikan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir terutama pada tahun 2014 yang mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 15,41 persen pada tahun 2014 dibandingkan dengan 8,80 persen pada tahun sebelumnya. Ini menunjukkan adanya perkembangan yang positif terhadap aktifitas LNPRT di Kota Sabang. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pemilihan presiden pada tahun 2014.

Although its contribution to GRDP is low, the expenditure component of NPISH shows growth rate of consumption growth of NPISH from year to year tend to increase. There was a significant increase in the past five years, especially in 2014 which experienced an almost two-fold increase compared to the previous year, which was 15.41 percent in 2014 compared to 8.80 percent in the previous year. This shows a positive development of NPISH activities in Sabang City. This was mainly due to the presidential election in 2014.

Setelah itu terjadi perlambatan sampai menjadi 5,20 persen pada tahun 2015. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang signifikan, yaitu menjadi 9,89 persen karena adanya pemilihan kepala daerah pada tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2017 tercatat laju pertumbuhan sebesar 9,71 persen.

After that there was a slowdown to 5.20 percent in 2015. In 2016 there was a significant increase, namely to 15.41 percent due to the regional head elections in 2017. Then, in 2017 the growth rate was recorded at 9.71 percent.

Gambar 3. 13 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi LNPRT ADHK 2010 (Persen), 2013-2017
Figure 3. 13 Growth Rate of NPISH Consumption Component at 2010 Constant Prices (Percent), 2013-2017



3.4 Konsumsi Pemerintah

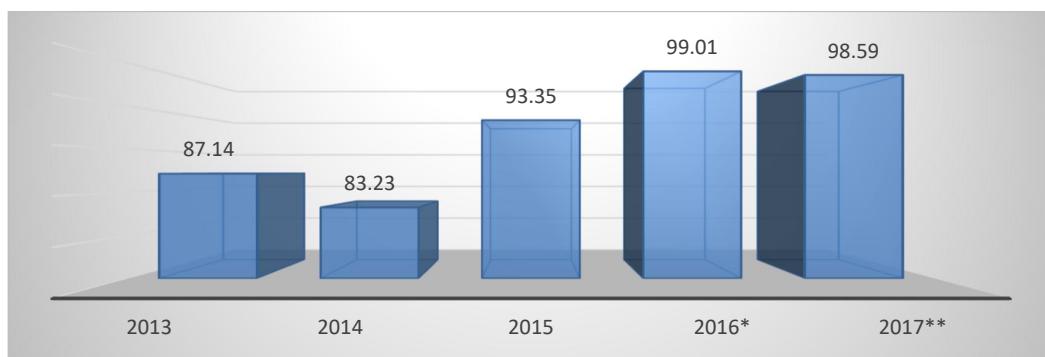
Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian. Konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kota Sabang memiliki peranan yang cukup besar dalam lima tahun terakhir, hal ini ditunjukkan dengan besarnya sumbangan komponen ini terhadap PDRB yang selalu di atas 50 persen. Kontribusi konsumsi pemerintah terjadi sedikit penurunan dari sebesar 87,14 persen pada tahun 2013 menjadi 83,23 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015, terjadi sedikit peningkatan kontribusi komponen ini menjadi sebesar 93,35 persen. Selanjutnya pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi 99,01 persen dan pada tahun berikutnya turun kembali menjadi 98,59 persen.

3.4 Government consumption

The final government consumption expenditure together with the final household expenditure and NPISH is the amount of final consumption in an economy. Government consumption in the economy of Sabang City has a significant role in the last five years, this is indicated by the large contribution of this component to GRDP which is always above 50 percent. The contribution of government consumption decreased slightly from 87.14 percent in 2013 to 83.23 percent in 2014. In 2015, there was a slight increase in the contribution of this component to 93.35 percent. Furthermore, in 2016 it again inclined to 99.01 percent and the following year fell back to 98.59 percent.

Gambar 3. 14 Distribusi Persentase Komponen Konsumsi Pemerintah ADHB (Persen), 2013-2017

Figure 3. 14 Percentage Distribution of Government Consumption Components at Current Prices (Percent), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

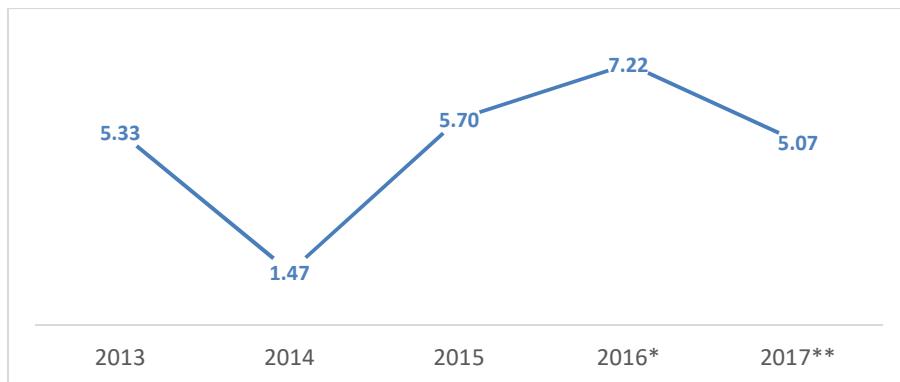
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, komponen konsumsi pemerintah tumbuh positif dan berfluktuatif. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,22 persen sementara pertumbuhan paling lemah di tahun 2014 sebesar 1,47 persen. Sedangkan pada tahun 2017 tercatat pertumbuhan sebesar 5,07 persen.

When viewed from the rate of growth, the component of government consumption grew positively and fluctuated. The highest growth was achieved in 2016 at 7.22 percent while the weakest growth in 2014 was 1.47 percent. Whereas in 2017 recorded growth of 5.07 percent.

Gambar 3. 15 Laju Pertumbuhan Komponen Konsumsi Pemerintah ADHK 2010 (Persen), 2013-2017

Figure 3. 15 Growth Rate of the 2010 Constant Prices of Government Consumption Component (Percent), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.5. Pembentukan Modal Tetap Bruto

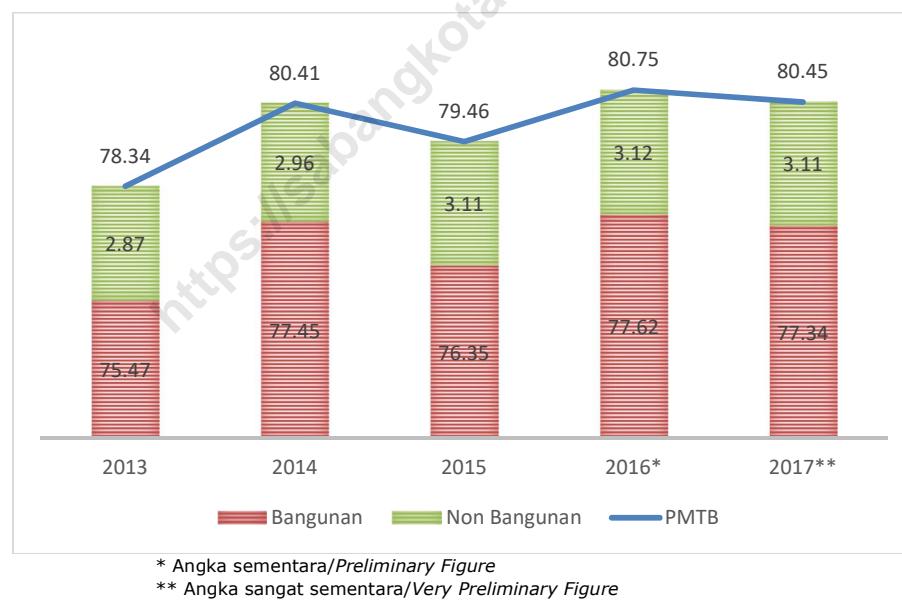
Komponen PMTB pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)². Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

3.5. Gross Fixed Capital Formation (GFCF)

The GFCF component in the GRDP according to expenditure explains more about the part of income that is realized into investment (physical). Or on a different side can also be interpreted as an illustration of various goods and services products which are partly used as physical investment (capital). The function of capital is as indirect input (*indirect input*) in the production process in various business fields. This capital can come from domestic production or from imports.

Gambar 3. 16 Distribusi Persentase Komponen PMTB ADHB (Persen), 2013-2017

Figure 3. 16 Percentage Distribution of GFCF at Current Prices (Percent) Components, 2013-2017



PMTB merupakan komponen dengan kontribusi terbesar kedua setelah konsumsi pemerintah selama periode 2013-2017. Nilai kontribusi paling tinggi adalah di tahun 2016 yaitu sebesar 80,75 persen dan terendah di tahun 2013 yaitu sebesar 78,34 persen.

GFCF is a component with the second largest contribution after household consumption during the 2013-2017 period. The highest contribution value in 2016 is 80,75 percent and the lowest in 2013 is 78,34 percent.

² Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun dieksport

²In addition to other parts that become intermediate consumption, final consumption, or exported

Jika dilihat berdasarkan subkomponen, PMTB bangunan memberikan kontribusi yang lebih besar bila dibandingkan dengan PMTB nonbangunan dengan besaran kontribusi pada tahun 2017 sebesar 3,11 persen.

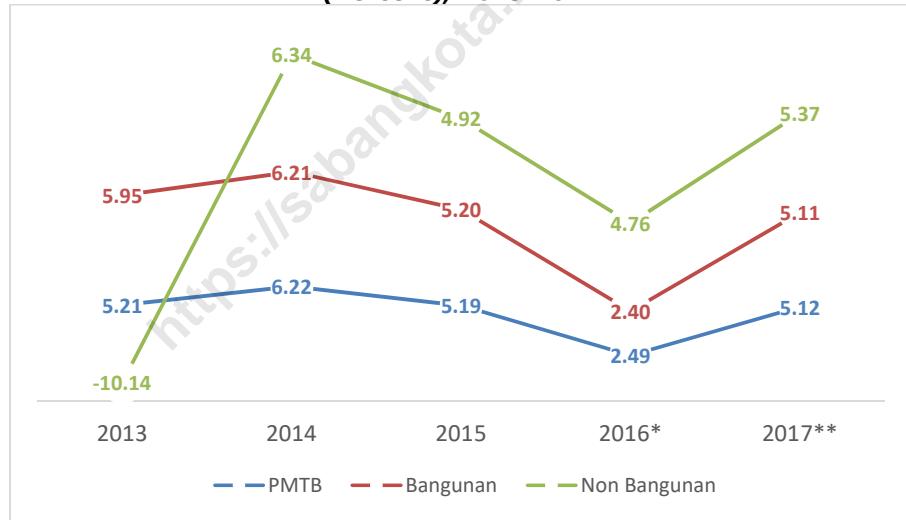
Selanjutnya, untuk laju pertumbuhan, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan PMTB bangunan jauh lebih stabil dibandingkan dengan non bangunan. Hal ini dikarenakan nilai PMTB bangunan sebagian besar bersumber dari dana anggaran pemerintah. Pertumbuhan PMTB non bangunan sangat berfluktuatif dan mencapai pertumbuhan yang negatif pada tahun 2013.

When viewed based on subcomponents, building GFCF gives a greater contribution when compared to building GFCF with the contribution of 2017 amounting to 18.48 percent.

Furthermore, for the growth rate, it can be seen that the growth rate of building GFCF is much more stable compared to non-buildings. This is because the value of building GFCF is mostly sourced from government budget funds. Non-building GFCF growth has fluctuated and achieved negative growth in 2013.

Gambar 3. 17 Laju Pertumbuhan Komponen PMTB ADHK 2010 (Persen), 2013-2017

Figure 3. 17 Growth Rate of 2010 GFCF Components at 2010 Constant Prices (Percent), 2013-2017



Laju pertumbuhan PMTB secara keseluruhan pada tahun 2017 bernilai positif yaitu sebesar 5,12 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 2,49 persen. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, laju pertumbuhan komponen ini mengalami fluktuasi. Pertumbuhan PMTB negatif yang terjadi pada tahun 2013 diakibatkan oleh nilai PMTB non bangunan yang terkontraksi cukup tajam.

The overall growth rate of GFCF in 2017 was positive at 5.12 percent, a decrease compared to 2016 which was 2.49 percent. In the past five years, the growth rate of this component has fluctuated. The negative GFCF growth that occurred in 2013 was caused by the sharply contracted non-building GFCF values.

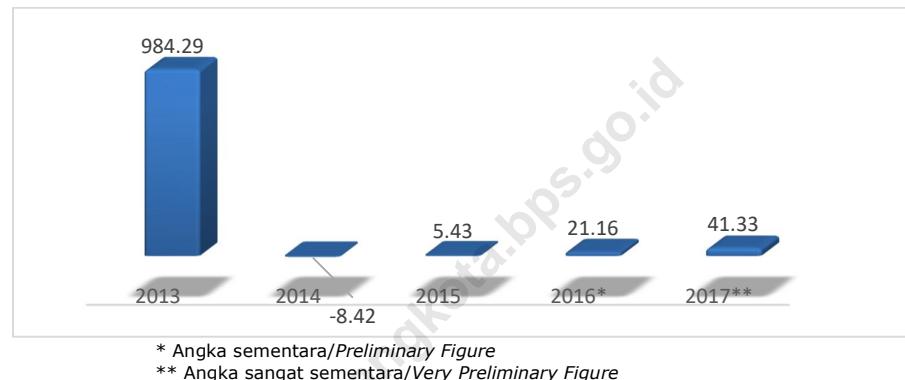
3.6 Perubahan Inventori

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis dengan lebih terperinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen perubahan inventori tidak banyak dikaji lebih mendalam.

3.6 Inventory Change

In contrast to other expenditure components that can be analyzed in more detail, changes in inventory can only be analyzed in terms of proportion. The difference in the estimation approach and procedures causes the inventory change component to not be studied more deeply.

Gambar 3. 18 Nilai Perubahan Inventori ADHB (Juta Rupiah), 2013-2017
Figure 3. 18 Inventory Change Value at Current Prices (Million Rupiah), 2013-2017

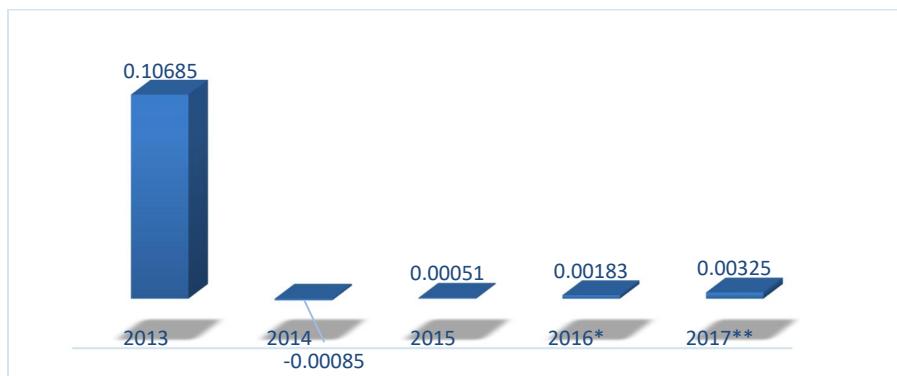


Selama periode tahun 2013-2017, nilai perubahan inventori sangat berfluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai nominal perubahan inventori ADHB tertinggi terjadi di tahun 2013 sebesar 984,29 juta rupiah dan turun hingga -8,42 juta rupiah di tahun 2014. Ini berarti terjadi penambahan persediaan barang yang cukup tinggi di tahun 2012, sedangkan di tahun 2014 terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Selanjutnya pada tahun 2017 nilai perubahan inventori meningkat menjadi 41,33 juta rupiah. Kontribusi perubahan inventori terhadap PDRB selama periode lima tahun terakhir merupakan yang terkecil dari seluruh komponen dengan kontribusi yaitu di bawah 1 persen.

During the period 2013-2017, the value of inventory changes was very volatile from year to year. The highest nominal value of inventory change at current prices occurred in 2013 amounting to 984.29 million rupiahs and down to -8.42 million rupiahs in 2014. This means that there was an increase in inventory that was quite high in 2012, while in 2016 there was a reduction in inventories. The occurrence of inventory accumulation indicates that distribution or marketing does not work perfectly. Furthermore, in 2017 the value of inventory changes increased to 41.33 million rupiah. The contribution of inventory changes to GRDP over the last five years is the smallest of all components with a contribution of under 1 percent.

Gambar 3. 19 Distribusi Persentase Perubahan Inventori ADHB (Persen), 2013-2017

Figure 3. 19 Percentage Distribution of Inventory Change at Current Prices (Percent), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

3.7 Ekspor dan Impor Antar Daerah (Net Ekspor)

Transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki dua angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung yaitu dengan metode *cross hauling*. Dari hasil penghitungan, diperoleh net ekspor yang bernilai negatif selama kurun waktu tahun 2013-2017 yang menunjukkan bahwa nilai impor Kota Sabang lebih besar daripada nilai ekspor dalam lima tahun terakhir.

3.7 Exports and Imports Between Regions (Net Exports)

The export-import transaction is seen as a balancing item in the balance of demand and supply of an economy. As with inventory changes, net exports between regions can also have two numbers, positive or negative. If this component is positive, it means that exports between regions are greater than imports between regions, and vice versa.

At present to separate net exports between regions into the value of exports between regions and the value of imports between regions is carried out by indirect method, namely the *cross hauling* method. From the results of the calculation, net exports were negative for the period of 2013-2017 which showed that the import value of Sabang City was greater than the value of exports in the last five years.

Tabel 3. 3 Nilai ADHB (Milliar Rupiah) dan Kontribusi Net Ekspor (Persen), 2013-2017**Table 3. 3 Current Prices Value (Billions of Rupiah) and Net Export Contribution (Percent), 2013-2017**

Rincian	2013 (1)	2014 (2)	2015 (3)	2016* (4)	2017** (5)
1 Nilai ADHB (Miliar Rupiah)	-1126.58	-1196.22	-1401.37	-1611.47	-1791.22
2 Kontribusi (Persen)	-122.30	-120.63	-144.63	-139.11	-140.76

* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

Nilai PDRB ADHB net ekspor dalam kurun waktu 2013-2017 terus menurun setiap tahunnya yang berarti bahwa setiap tahun, impor Kota Sabang terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Sabang terhadap daerah lain masih tinggi.

The net of GRDP export value at current prices in the 2013-2017 period continues to decline every year which means that every year, Sabang's City imports continue to increase. This shows that the level of dependence of Sabang City on other regions is still high.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGGUNAAN

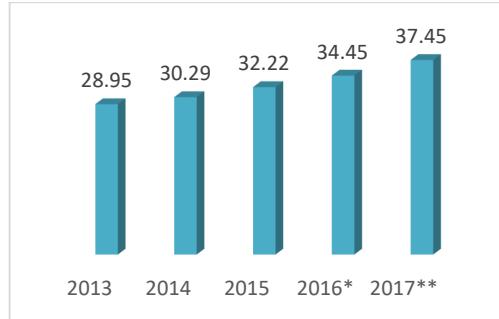
IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGGUNAAN

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut beberapa rasio (perbandingan relatif):

4.1 PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kota Sabang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Sabang rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar 20,95 juta rupiah di tahun 2017. Capaian ini meningkat sebesar 11,55 persen jika dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya yang sebesar 18,53 juta rupiah perkapita. Selama kurun waktu 2013-2017 terlah terjadi peningkatan PDRB perkapita dari 15,09 juta rupiah perkapita pada tahun 2013 menjadi 20,95 juta rupiah perkapita pada tahun 2017. Sedangkan untuk pertumbuhan tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,96 persen.

Gambar 4. 1 Nilai PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah), 2013-2017
Figure 4. 1 Value of GRDP Per Capita at Current Prices (Million Rupiah), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

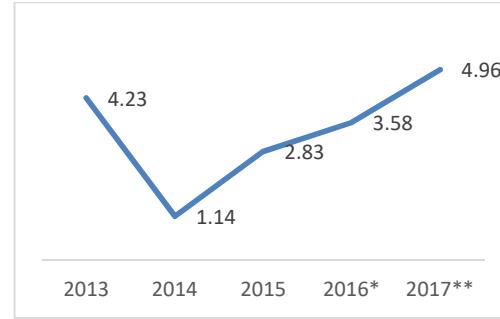
IV. DEVELOPMENT OF GRDP AGGREGATE BY USE

Various macroeconomic indicators commonly used in socioeconomic analysis can be derived from a set of PRDB data. Here are some ratios (relative comparison):

4.1 GRDP per Capita

GRDP per capita in Sabang City shows an increase from year to year, in line with the increase in population. This indicator shows that each Sabang population is economically capable of creating GRDP or (added value) of 20.95 million rupiah in 2017. This achievement increased by 11.55 percent compared to the previous year's achievement of 18.53 million rupiah per capita. During the period 2013-2017 there was an increase in GRDP per capita from 15.09 million rupiah per capita in 2013 to 20.95 million rupiah per capita in 2017. While for the highest growth was recorded in 2017 which was 4.96 percent.

Gambar 4. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK (Persen), 2013-2017
Figure 4. 2 Growth Rate of GRDP Per Capita at Current Prices (Percent), 2013-2017



4.2 Perbandingan Konsumsi Pemerintah Terhadap Ekspor

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi pemerintah di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi pemerintah mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kota Sabang (sekitar 80 persen), yang artinya bahwa sebagian besar produk yang dihasilkan di wilayah Kota Sabang digunakan untuk konsumsi akhir pemerintah. Selain dihasilkan di wilayah Kota Sabang, terdapat pula sebagian produk yang berasal dari impor. Pada tahun 2013, produk yang digunakan untuk konsumsi pemerintah 2,11 kali lebih banyak daripada yang diekspor ke daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyediaan domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir pemerintah. Rasio ini terus meningkat hingga menjadi 2,27 pada tahun 2017.

Gambar 4. 3 Nilai Komponen Konsumsi Pemerintah dan Ekspor ADHB (Triliun Rp), 2013-2017

Figure 4. 3 Value of Government Consumption Components and Exports at Current Prices (Trillions of Rp.), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

4.2 Comparison of Government Consumption to Exports

This indicator shows a comparison between products consumed by households in the domestic region and products exported. During this time household consumption has a very dominant contribution in the use of GRDP in Sabang City (around 80 percent), which means that most of the products produced in the Sabang City are used for final household consumption. Besides being produced in Sabang City, there are also some products that come from imports. In 2013, the products used for household consumption were 2.11 times more than those exported to other regions. This shows that most domestic supply is absorbed to meet the demand for final household consumption. This ratio continues to incline to 2.27 in 2017.

Gambar 4. 4 Rasio Komponen Konsumsi Pemerintah Terhadap Ekspor, 2013-2017

Figure 4. 4 Ratio of Government Consumption Components to Exports, 2013-2017

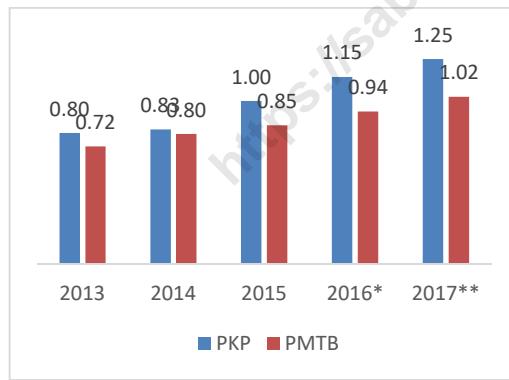


4.3 Perbandingan Konsumsi Pemerintah Terhadap PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir pemerintah dengan yang digunakan untuk investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB). Antara tahun 2013-2017, rasio konsumsi pemerintah terhadap PMTB cenderung meningkat, dari sebesar 1,11 pada tahun 2013 menjadi 1,23 pada tahun 2017. Selama periode tersebut, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB pernah mengalami penurunan pada tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan nilai investasi secara signifikan, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan.

Gambar 4. 5 Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga dan PMTB ADHB (Triliun Rp), 2013-2017

Figure 4. 5 Value of Household Consumption Components and GFCF at Current Prices (Trillions of Rp.), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

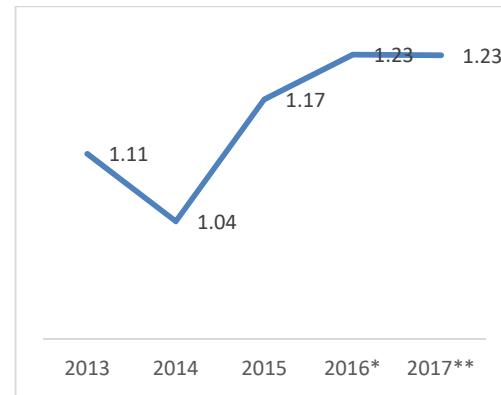
** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

4.3 Comparison of Government Consumption to GFCF

This ratio is a comparison between the products used for government final consumption and those used for physical investment (Gross Fixed Capital Formation/GFCF). Between 2013-2017, the ratio of government consumption to GFCF tended to incline, from 1,11 in 2013 to 1,23 in 2017. During this period, the ratio of government consumption to GFCF has experienced a decline in 2014. This is due to a significant decrease in the value of investment, while the final consumption of households is accelerating.

Gambar 4. 6 Rasio Komponen Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PMTB, 2013-2017

Figure 4. 6 Ratio of Household Consumption Components to GFCF, 2013-2017



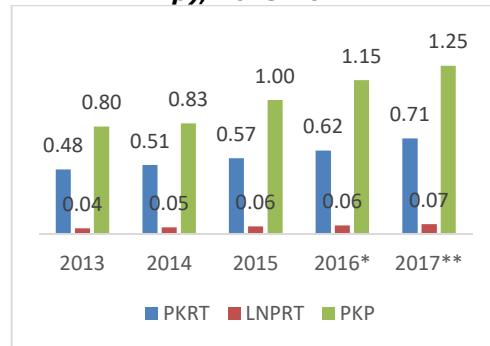
4.4 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Secara umum, proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB mengalami kenaikan, dari sebesar 143,86 persen pada tahun 2013 menjadi 160,30 persen pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Sabang masih tergantung dengan impor dan belum menghasilkan investasi yang tinggi. Angka proporsi yang menunjukkan angka lebih dari 100 dapat diartikan bahwa total PDRB Kota Sabang belum mampu untuk memenuhi konsumsi akhir, sehingga diperlukan impor dari daerah lain.

Gambar 4. 7 Nilai Komponen Konsumsi Akhir (Triliun Rp), 2013-2017

Figure 4. 7 Value of Final Consumption Components (Trillions of Rp), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

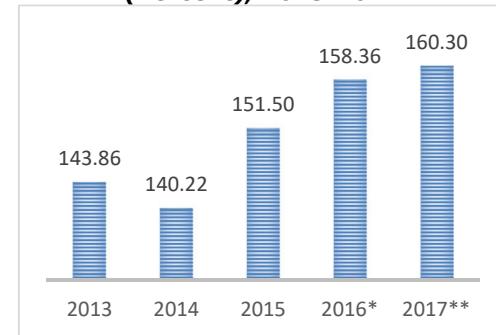
4.4 Proportion of Total Final Consumption Expenditures to GRDP

The definition of final consumption is the use of various end products (both from domestic and imported products), for support economic activity. Final consumption actors include households, NPISH, and the government. Even though these three institutions have different functions in the economic system, they both spend a portion of their income for final consumption purposes.

In general, the proportion of final consumption to GRDP has decreased, from 143.86 percent in 2013 to 160.30 percent in 2017. This shows that the population of Sabang is still dependent on imports and has not produced high investment. The number of proportions showing numbers over 100 can mean that the total GRDP of Sabang City has not been able to meet the final consumption, so that imports from other regions are needed.

Gambar 4. 8 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB (Persen), 2013-2017

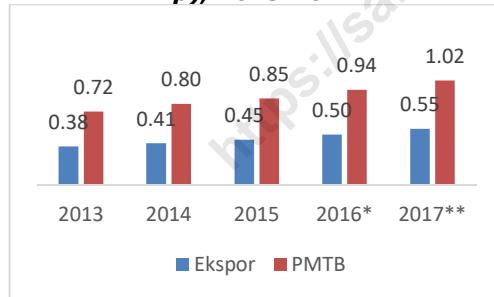
Figure 4. 8 Proportions of Total Final Consumption Expenditures on GRDP (Percent), 2013-2017



4.5 Perbandingan Eksport Terhadap PMTB

Eksport merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar negeri. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio eksport terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk eksport dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB). Pada periode tahun 2013-2017, besarnya nilai eksport selalu setengah kali lipatnya nilai PMTB (ratio<1). Pada tahun 2013, tercatat rasio eksport terhadap PMTB sebesar 0,53 lalu turun 0,02 poin menjadi 0,51 pada tahun 2014. Kemudian naik lagi pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 0,54 pada tahun 2017.

Gambar 4. 9 Nilai Komponen Eksport dan PMTB (Trilliun Rp), 2013-2017
Figure 4. 9 Value of Export Components and PMTB (Trillions of Rp), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

4.6 Perbandingan PDRB Terhadap Impor

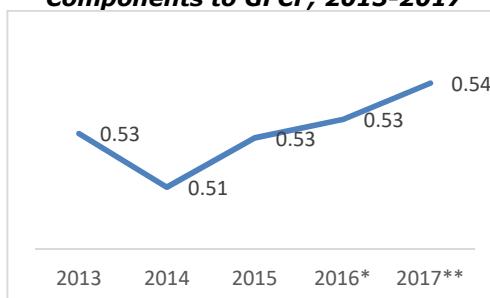
Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu rasio ini menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh negara lain. Jika rasonya kecil berarti

4.5 Comparison of Exports to GFCF

Exports are products that are not consumed in domestic territory, but are traded abroad. To produce exported products, it is most likely to use capital (GFCF). While on the other hand some of the goods exported can also be capital goods. The ratio of exports to GFCF is intended to show a comparison between the value of export products and the value of products that become capital (GFCF). In the period 2013-2017, the value of exports is always half a fold the GFCF value (ratio<1). In 2013, it was recorded that the export to GFCF ratio was 0,53, then up 0.02 points to 0.51 in 2014. Then it declined again in the following years to 0.54 in 2017.

Gambar 4. 10 Rasio Komponen Eksport Terhadap PMTB, 2013-2017

Figure 4. 10 Ratio of Export Components to GFCF, 2013-2017



4.6 Comparison of GRDP on Imports

This ratio provides an illustration of the comparison between products produced in the domestic economic region (GRDP) and products derived from imports. In addition this ratio explains the dependence of GRDP on products produced by other countries. If the ratio is small it means

ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Rasio PDRB terhadap impor pada kurun waktu 2013-2017 selalu dibawah satu. Masing-masing sebesar 0,61 pada tahun 2013 kemudian meningkat menjadi 0,62 pada tahun 2014. Pada tahun 2015 rasio ini tetap turun pada level 0,58, kemudian kembali turun pada tahun 2016 menjadi 0,55 dan turun lagi menjadi 0,54 pada tahun 2017. Penurunan ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan Kota Sabang terhadap impor barang dan jasa.

Gambar 4. 11 Nilai Komponen PDRB dan Impor (Triliun Rp), 2013-2017
Figure 4. 11 Value of GDP and Import Components (Trillions of Rp), 2013-2017



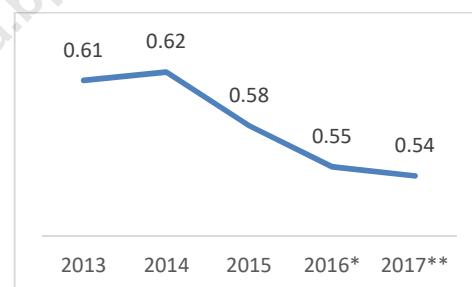
* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

dependence on imports is getting higher, and vice versa.

The GRDP ratio to imports in the 2013-2017 period is always below one. Each of 0.61 in 2013 then increased to 0.62 in 2014. In 2015 this ratio remained decreased at the level of 0.58, then decreased again in 2016 to 0.55 and decreased again to 0.54 in 2017. This decreased shows the incline in Sabang's City's dependence on imports of goods and services.

Gambar 4. 12 Rasio Komponen PDRB Terhadap Impor, 2013-2017
Figure 4. 12 Ratio of GRDP Components to Imports, 2013-2017



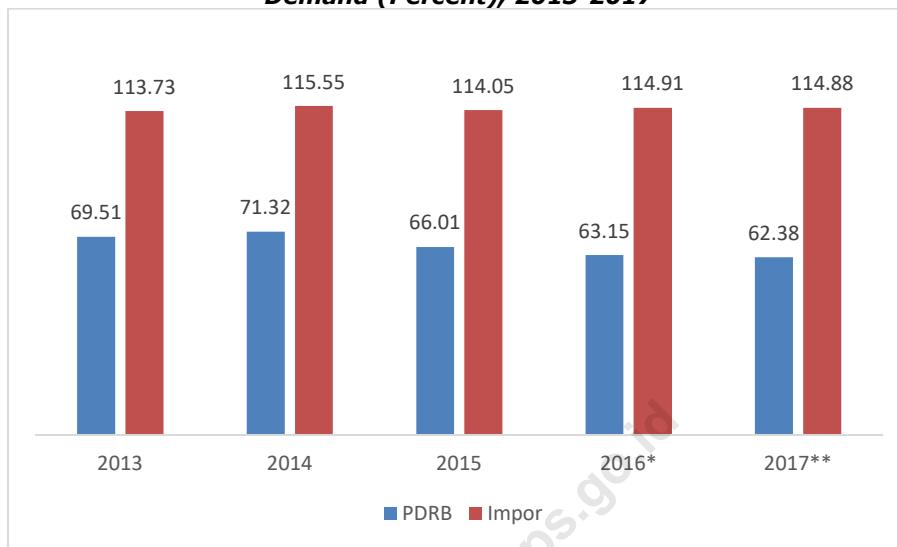
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan dengan total permintaan akhir. Dalam memenuhi permintaan akhir domestik, Kota Sabang masih harus mendatangkan barang dari luar negeri dan luar daerah, sebanyak sekitar 113 persen. Angka tersebut terus mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang sangat lambat yaitu sebesar 113,73 persen pada tahun 2013 menjadi 114,88 pada tahun 2017.

4.7 Balance of Total Supply and Total Demand

This ratio can show how much economic dependence of a region by products originating from imports. This dependence can be seen through the balance between the total supply and the total final demand. In meeting domestic final demand, Sabang City still has to bring in goods from abroad and outside the region, as much as 113 percent. This figure continues to incline despite a very slow rate of 113.73 percent in 2013 to 114.88 in 2017.

Gambar 4. 13 Proporsi PDRB dan Komponen Impor Terhadap Total Permintaan Akhir (Persen), 2013-2017
Figure 4. 13 Proportion of GRDP and Import Components Against Total Final Demand (Percent), 2013-2017



* Angka sementara/Preliminary Figure

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figure

<https://sabangkota.bps.go.id>

BAB V PENUTUP



<https://sabangkota.bps.go.id>

V. PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran Kota Sabang tahun 2013-2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Sabang pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator social demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013-2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.

V. CONCLUSION

1. *The GRDP according to Sabang City expenditure in 2013-2017 can describe changes in the structure and development of the economic conditions of Sabang City in the period concerned. Economic analysis in terms of expenditure GRDP will be different from business (industry) analysis which focuses more on production behavior. The expenditure GRDP analysis focuses on the use of final goods and services, both for the purpose of final consumption, investment (physical), and international and inter-regional trade. Four sector groups or economic actors who use the final goods and services in an economy are households, non-profit institutions that serve households / LNPRT, government, and companies.*
2. *This publication presents a simple analysis of consumption, investment and foreign trade behavior and trade between the regions in question. The analysis is based on indicators derived from expenditure GRDP. The analysis is also complemented by indicators of social demography (such as residents, households and civil servants), so the results of the analysis presented are more informative.*
3. *Data can be presented in the form of series data from 2013-2017, so that it is easy to describe changes or trends that occur between times. Each parameter is presented in different units (rupiah, index, percentage, ratio, unit, etc.) according to the purpose of the analysis and the characteristics of each data.*

4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variable ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (external account) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (current tranfer) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Aceh terhadap ekonomi negara lain (rest of the world).
4. *Data and indicators derived from GRDP data according to expenditure can be used as a reference for the development and expansion of other macroeconomic indicators such as disposable income, savings, and simple economic models that are interrelated between all available economic variables and variables. Even directly or indirectly can be associated with the display of other macroeconomic data such as GRDP according to business fields (industry), Input-Output Tables, Socio-Economic Balance Systems (SNSE) and even Fund Flow Balance.*
5. *Some data on interactions with foreign countries (external accounts) in aggregate are presented here, such as exports and imports, and net current transfers. This external transaction illustrates the extent of Aceh Province's economic dependence on the rest of the world economy.*

LAMPIRAN



<https://sabangkota.bps.go.id>

LAMPIRAN ATTACHMENT

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2013-2017

Attachment 1 Gross Regional Domestic Product at Current Prices by Expenditures (million rupiah), 2013-2017

Komponen		2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	480,341.94	513,953.74	566,471.91	623,267.31	711,767.56
a.	Makanan, Minuman & Rokok	278,614.73	294,306.24	327,155.05	356,563.71	415,227.29
b.	Pakaian & Alas Kaki	19,693.43	22,234.45	24,694.19	28,768.97	33,558.30
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	69,818.08	73,386.90	79,701.19	88,132.66	95,580.66
d.	Kesehatan & Pendidikan	25,626.58	27,388.53	29,655.21	33,080.77	36,711.32
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	57,865.71	64,680.42	69,444.12	76,230.45	84,299.24
f.	Hotel & Restoran	14,131.59	15,880.71	17,727.70	20,326.65	23,876.65
g.	Lainnya	14,591.81	16,076.50	18,094.44	20,164.10	22,514.10
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	42,137.31	51,117.82	55,747.51	64,237.43	73,582.10
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	802,680.68	825,376.94	998,968.53	,146,975.45	,254,625.45
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	721,582.39	797,424.51	850,258.03	935,408.93	1,023,771.16
a.	Bangunan	695,169.01	768,028.65	816,983.80	899,223.53	984,230.64
b.	Non-Bangunan	26,413.38	29,395.86	33,274.23	36,185.40	39,540.52
5	Perubahan Inventori	984.29	(8.42)	5.43	21.16	41.33
6	Ekspor	380,562.72	410,464.60	447,560.27	496,490.93	552,212.48
7	Dikurangi Impor	1,507,142.42	1,606,680.34	1,848,933.44	2,107,956.00	2,343,427.63
P D R B		921,146.90	991,648.85	1,070,078.243812	1,158,445.21	1,272,572.45

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

**Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2013-2017**

	Komponen (1)	2013 (2)	2014 (3)	2015 (4)	2016* (5)	2017** (6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	426,056.84	438,877.33	459,293.90	481,044.06	505,673.56
a.	Makanan, Minuman & Rokok	252,590.32	258,508.40	273,049.32	285,983.83	302,396.81
b.	Pakaian & Alas Kaki	16,644.50	17,255.35	17,954.19	19,065.18	20,324.31
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	59,868.72	62,598.06	64,952.39	68,102.53	69,885.29
d.	Kesehatan & Pendidikan	22,036.48	22,638.93	23,446.58	24,331.70	25,364.04
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	49,875.17	51,983.35	53,156.95	55,700.62	58,580.45
f.	Hotel & Restoran	11,692.35	12,112.11	12,477.89	13,094.65	13,845.88
g.	Lainnya	13,349.31	13,781.13	14,256.58	14,765.54	15,276.77
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	37,941.04	43,787.75	46,064.71	50,620.51	55,535.27
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	663,396.30	673,171.89	711,564.34	762,939.29	801,613.85
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	623,596.18	662,382.62	696,753.62	714,107.45	750,654.17
a.	Bangunan	599,115.46	636,349.21	669,439.37	685,493.03	720,504.15
b.	Non-Bangunan	24,480.72	26,033.41	27,314.26	28,614.42	30,150.02
5	Perubahan Inventori	859.23	(6.64)	4.23	15.10	28.24
6	Ekspor	320,187.96	318,196.27	326,284.42	334,372.56	345,016.12
7	Dikurangi Impor	1,231,031.89	1,261,290.52	1,326,978.02	1,385,805.37	1,443,096.00
	P D R B	841,005.66	875,118.71	912,987.20	957,293.60	1,015,425.21

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 3 Distribusi Persentase Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen), 2013-2017

	Komponen (1)	2013	2014	2015	2016*	2017**
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	52.15	51.83	52.94	53.80	55.93
a.	Makanan, Minuman & Rokok	30.25	29.68	30.57	30.78	32.63
b.	Pakaian & Alas Kaki	2.14	2.24	2.31	2.48	2.64
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	7.58	7.40	7.45	7.61	7.51
d.	Kesehatan & Pendidikan	2.78	2.76	2.77	2.86	2.88
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	6.28	6.52	6.49	6.58	6.62
f.	Hotel & Restoran	1.53	1.60	1.66	1.75	1.88
g.	Lainnya	1.58	1.62	1.69	1.74	1.77
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.57	5.15	5.21	5.55	5.78
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	87.14	83.23	93.35	99.01	98.59
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	78.34	80.41	79.46	80.75	80.45
a.	Bangunan	75.47	77.45	76.35	77.62	77.34
b.	Non-Bangunan	2.87	2.96	3.11	3.12	3.11
5	Perubahan Inventori	0.11	(0.00)	0.00	0.00	0.00
6	Ekspor	41.31	41.39	41.83	42.86	43.39
7	Dikurangi Impor	163.62	162.02	172.78	181.96	184.15
	P D R B	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Lampiran 4 Distribusi Persentase Pengeluaran Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen), 2013-2017

Komponen		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	50.66	50.15	50.31	50.25	49.80	
a. Makanan, Minuman & Rokok	30.03	29.54	29.91	29.87	29.78	
b. Pakaian & Alas Kaki	1.98	1.97	1.97	1.99	2.00	
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	7.12	7.15	7.11	7.11	6.88	
d. Kesehatan & Pendidikan	2.62	2.59	2.57	2.54	2.50	
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	5.93	5.94	5.82	5.82	5.77	
f. Hotel & Restoran	1.39	1.38	1.37	1.37	1.36	
g. Lainnya	1.59	1.57	1.56	1.54	1.50	
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4.51	5.00	5.05	5.29	5.47	
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	78.88	76.92	77.94	79.70	78.94	
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	74.15	75.69	76.32	74.60	73.93	
a. Bangunan	71.24	72.72	73.32	71.61	70.96	
b. Non-Bangunan	2.91	2.97	2.99	2.99	2.97	
5 Perubahan Inventori	0.10	(0.00)	0.00	0.00	0.00	
6 Ekspor	38.07	36.36	35.74	34.93	33.98	
7 Dikurangi Impor	146.38	144.13	145.34	144.76	142.12	
P D R B	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

**Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017**

Komponen		2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.37	7.00	10.22	10.03	14.20
a.	Makanan, Minuman & Rokok	6.24	5.63	11.16	8.99	16.45
b.	Pakaian & Alas Kaki	7.54	12.90	11.06	16.50	16.65
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	7.90	5.11	8.60	10.58	8.45
d.	Kesehatan & Pendidikan	8.29	6.88	8.28	11.55	10.97
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	10.52	11.78	7.36	9.77	10.58
f.	Hotel & Restoran	8.25	12.38	11.63	14.66	17.46
g.	Lainnya	12.07	10.17	12.55	11.44	11.65
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12.70	21.31	9.06	15.23	14.55
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11.62	2.83	21.03	14.82	9.39
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.01	10.51	6.63	10.01	9.45
a.	Bangunan	6.71	10.48	6.37	10.07	9.45
b.	Non-Bangunan	(9.74)	11.29	13.19	8.75	9.27
5	Perubahan Inventori	(93.59)	(100.86)	(164.45)	289.94	95.30
6	Ekspor	4.09	7.86	9.04	10.93	11.22
7	Dikurangi Impor	7.02	6.60	15.08	14.01	11.17
P D R B		7.46	7.65	7.91	8.26	9.85

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

**Lampiran 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017**

Komponen		2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.16	3.01	4.65	4.74	5.12
a.	Makanan, Minuman & Rokok	2.82	2.34	5.62	4.74	5.74
b.	Pakaian & Alas Kaki	3.38	3.67	4.05	6.19	6.60
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.78	4.56	3.76	4.85	2.62
d.	Kesehatan & Pendidikan	3.77	2.73	3.57	3.78	4.24
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	3.28	4.23	2.26	4.79	5.17
f.	Hotel & Restoran	3.90	3.59	3.02	4.94	5.74
g.	Lainnya	4.65	3.23	3.45	3.57	3.46
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8.80	15.41	5.20	9.89	9.71
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.33	1.47	5.70	7.22	5.07
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.21	6.22	5.19	2.49	5.12
a.	Bangunan	5.95	6.21	5.20	2.40	5.11
b.	Non-Bangunan	(10.14)	6.34	4.92	4.76	5.37
5	Perubahan Inventori	(94.44)	(100.77)	(163.71)	256.96	87.01
6	Ekspor	(1.98)	(0.62)	2.54	2.48	3.18
7	Dikurangi Impor	2.11	2.46	5.21	4.43	4.13
P D R B		4.23	4.06	4.33	4.85	6.07

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

**Lampiran 7 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (2010 = 100), 2013-2017**

Komponen		2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	123.40	122.93	126.63	129.75	138.49
a.	Makanan, Minuman & Rokok	119.38	118.85	124.75	127.98	141.09
b.	Pakaian & Alas Kaki	127.08	128.18	134.84	146.08	150.93
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	126.63	124.85	123.18	126.23	130.24
d.	Kesehatan & Pendidikan	131.55	125.94	125.32	129.09	134.04
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	130.48	132.43	132.63	131.74	130.33
f.	Hotel & Restoran	132.87	133.15	135.79	143.84	150.35
g.	Lainnya	135.31	136.04	138.98	138.19	140.04
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	135.30	152.17	149.10	152.45	143.95
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	140.29	126.35	138.91	142.89	152.01
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	140.31	138.14	124.91	129.63	128.38
a.	Bangunan	141.15	139.72	125.41	129.35	128.15
b.	Non-Bangunan	121.29	106.75	113.71	137.00	134.51
5	Perubahan Inventori	11.49	(0.38)	0.04	2.15	(490.84)
6	Eksport	117.01	119.03	122.41	130.46	134.53
7	Dikurangi Impor	137.67	131.05	131.29	139.86	145.86
P D R B		123.50	123.45	124.83	125.76	128.33

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

**Lampiran 8 Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (2010 = 100), 2013-2017**

Komponen		2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	112.74	117.11	123.34	129.57	140.76
a.	Makanan, Minuman & Rokok	110.30	113.85	119.82	124.68	137.31
b.	Pakaian & Alas Kaki	118.32	128.86	137.54	150.90	165.11
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	116.62	117.24	122.71	129.41	136.77
d.	Kesehatan & Pendidikan	116.29	120.98	126.48	135.96	144.74
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	116.02	124.43	130.64	136.86	143.90
f.	Hotel & Restoran	120.86	131.11	142.07	155.23	172.45
g.	Lainnya	109.31	116.66	126.92	136.56	147.37
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	111.06	116.74	121.02	126.90	132.50
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	121.00	122.61	140.39	150.34	156.51
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	115.71	120.39	122.03	130.99	136.38
a.	Bangunan	116.03	120.69	122.04	131.18	136.60
b.	Non-Bangunan	107.89	112.92	121.82	126.46	131.15
5	Perubahan Inventori	118.86	129.00	137.17	148.48	160.05
6	Ekspor	122.43	127.38	139.33	152.11	162.39
7	Dikurangi Impor	122.43	127.38	139.33	152.11	162.39
P D R B		109.53	113.32	117.21	121.01	125.32

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Lampiran 9 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (2010 = 100), 2013-2017

Komponen		2013	2014	2015	2016*	2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	112.74	117.11	123.34	129.57	140.76
a.	Makanan, Minuman & Rokok	110.30	113.85	119.82	124.68	137.31
b.	Pakaian & Alas Kaki	118.32	128.86	137.54	150.90	165.11
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	116.62	117.24	122.71	129.41	136.77
d.	Kesehatan & Pendidikan	116.29	120.98	126.48	135.96	144.74
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	116.02	124.43	130.64	136.86	143.90
f.	Hotel & Restoran	120.86	131.11	142.07	155.23	172.45
g.	Lainnya	109.31	116.66	126.92	136.56	147.37
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	111.06	116.74	121.02	126.90	132.50
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	121.00	122.61	140.39	150.34	156.51
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	115.71	120.39	122.03	130.99	136.38
a.	Bangunan	116.03	120.69	122.04	131.18	136.60
b.	Non-Bangunan	107.89	112.92	121.82	126.46	131.15
5	Perubahan Inventori	114.55	126.82	128.30	140.15	146.36
6	Ekspor	118.86	129.00	137.17	148.48	160.05
7	Dikurangi Impor	122.43	127.38	139.33	152.11	162.39
P D R B		109.53	113.32	117.21	121.01	125.32

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Lampiran 10 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran (persen), 2013-2017

Komponen		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.08	3.87	5.32	5.05	8.64
a.	Makanan, Minuman & Rokok	3.33	3.21	5.24	4.06	10.13
b.	Pakaian & Alas Kaki	4.02	8.91	6.74	9.71	9.42
c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan & Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.97	0.53	4.67	5.46	5.68
d.	Kesehatan & Pendidikan	4.36	4.03	4.55	7.49	6.46
e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	7.01	7.24	4.99	4.76	5.15
f.	Hotel & Restoran	4.18	8.48	8.36	9.26	11.09
g.	Lainnya	7.10	6.72	8.80	7.60	7.92
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.58	5.11	3.67	4.86	4.41
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.97	1.33	14.50	7.08	4.11
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	0.75	4.04	1.37	7.34	4.12
a.	Bangunan	0.72	4.02	1.12	7.49	4.13
b.	Non-Bangunan	0.45	4.65	7.89	3.81	3.71
5	Perubahan Inventori	15.43	10.71	1.16	9.24	4.43
6	Ekspor	6.18	8.53	6.33	8.25	7.79
7	Dikurangi Impor	4.80	4.05	9.38	9.17	6.76
P D R B		3.10	3.46	3.43	3.25	3.56

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
- _____, 1980-1990. Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, Jakarta.
- _____, Implementasi SNA 2008 Dalam Penyusunan PDB Indonesia Tahun Dasar 2010, booklet, Jakarta.
- _____, Pendapatan Nasional Indonesia, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Perubahan Tahun Dasar PDB Berbasis SNA 2008, booklet, Jakarta.
- _____, Statistik Industri, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Statistik Listrik, Gas dan Air, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Statistik Pertambangan Migas, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Statistik Pertambangan Non Migas, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Statistik Konstruksi, berbagai seri, Jakarta.
- _____, Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat, berbagai seri, Jakarta.
- _____, 2000. Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997, Jakarta.
- _____, 1999. Profil Ekonomi Rumahtangga 1998, Jakarta.
- Frenken Jim, 1992. How To Measure Tangible Capital Stocks, Netherlands.
- Host Poul, Madsen, 1979 Macroeconomic Accounts An Overview, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC.
- Keuning. J. Steven, 1988. An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta.
- United Nations, A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3, New York,
- _____, 1973. Input-Output Table and Analysis, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York,
- _____, 1986. Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods, Series F No. 39, New York,
- _____, 1988. Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50, New York,
- _____, 2000. Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York,
- Verbiest Piet, 1997. Investment Matrix, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta,
- Ward, Michael, 1976. The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries, Paris,
- World Bank, 1993. System of National Accounts 1993, Bahan Kursus, Washington DC,



DATTA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SABANG**

Jl. Teuku Umar No.28 Kota Sabang
Telp/Fax (0652)21346, Email : bps1172@bps.go.id